

GLOBAL COMPACT UNTUK MIGRASI YANG AMAN, TERTIB, DAN REGULER

Naskah Akhir

11 Juli 2018

Kami, kepala-kepala Negara, kepala Pemerintahan, dan Perwakilan Tinggi yang berkumpul di Maroko pada 10 dan 11 Desember 2018, kembali menyerukan Deklarasi New York untuk Pengungsi dan Migran serta bertekad memberikan sumbangan yang berarti untuk memajukan kerjasama di bidang migrasi internasional dalam segenap dimensinya, dengan mengadopsi Global Compact untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Reguler.

MUKADIMAH

1. Global Compact ini bersandar pada tujuan dan prinsip Piagam PBB
2. Menyandarkan diri pula pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; perjanjian-perjanjian internasional pokok hak asasi manusia lainnya¹; Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, termasuk Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia terutama Perempuan dan Anak dan Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara; Konvensi Perbudakan dan Konvensi Pelengkap tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga serta Praktik Serupa dengan Perbudakan; Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim; Konvensi PBB untuk Memerangi Penggurunan; Perjanjian Paris²; Konvensi Organisasi Buruh Internasional untuk memajukan kerja layak dan migrasi

¹ Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan serta Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Lainnya, Konvensi Hak Anak, Konvensi Internasional Perlindungan Hak Seluruh Migran dan Anggota Keluarganya, Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Penghilangan Paksa, Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas

² Diadopsi UNFCCC dalam FCCC/CP/2015/10/Add.1, keputusan 1/CP.21

tenaga kerja³; serta Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030; Agenda Aksi Addis Ababa; Kerangka Sendai untuk Pengurangan Resiko Bencana, dan Agenda Urban Baru.

3. Diskusi tingkat global tentang migrasi internasional bukanlah hal yang baru. Kami mengingat kembali kemajuan yang telah dicapai melalui Dialog Tingkat Tinggi PBB tentang Migrasi Internasional dan Pembangunan pada tahun 2006 dan 2013. Kami menghargai pula sumbangan dari Forum Global tentang Migrasi dan Pembangunan yang diluncurkan pada 2007. Seluruh pijakan tersebut membangun jalan bagi Deklarasi New York untuk Pengungsi dan Migran, dan melalui pijakan itulah kami berkomitmen untuk menjabarkan Global Compact untuk Pengungsi dan mengadopsi Global Compact untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Reguler ini, dalam dua proses yang terpisah. Kedua Global Compact, bersama-sama, menyajikan kerangka kerjasama internasional yang saling melengkapi, yang memenuhi mandatnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Deklarasi New York untuk Pengungsi dan Migran, yang menyadari pula bahwa para migran dan pengungsi menghadapi banyak kemiripan tantangan dan kerentanan

4. Pengungsi dan migran sama berhak atas hak asasi manusia universal dan kebebasan dasar, yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi pada setiap saat. Namun demikian, kelompok migran dan pengungsi diatur oleh tata kelola dan kerangka hukum yang terpisah. Hanya pengungsi yang berhak atas perlindungan internasional khusus sebagaimana diatur oleh hukum pengungsi internasional. Global Compact ini mengacu pada migran dan menyajikan kerangka kerja kerjasama untuk menangani masalah migrasi dalam segenap dimensinya.

5. Menyangkut andil dalam proses persiapan untuk Global Compact ini, kami mengakui masukan yang diberikan Negara-negara Anggota dan pemangku kepentingan yang relevan selama fase konsultasi dan penghimpunan pengetahuan, serta laporan dari Sekretaris-Jenderal, berjudul “Agar Migrasi Berjalan Baik bagi Semua”.

³ Konvensi Migrasi dan Ketenagakerjaan tahun 1949 (Nomer 97), Konvensi Buruh Migran tahun 1975 (Nomer 143), Konvensi tentang Perlakuan yang Sama tahun 1962 (Nomer 118), Konvensi Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga tahun 2011 (Nomer 189).

6. Global Compact ini merupakan tonggak sejarah dalam dialog global dan kerja sama internasional tentang migrasi. Muasalnya adalah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2010 dan Agenda Aksi Addis Ababa, dan dinyatakan dalam Deklarasi pada Dialog Tingkat Tinggi tentang Migrasi Internasional dan Pembangunan yang diadopsi pada Oktober 2013. Dibentuk dari kerja rintisan mantan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Migrasi dan Pembangunan Internasional, sebagaimana tercantum dalam laporan beliau pada 3 Februari 2017.

7. Global Compact ini menyajikan kerangka kerja kerjasama yang tidak mengikat secara hukum, yang dilandaskan pada komitmen yang disepakati oleh Negara-negara Anggota dalam Deklarasi New York untuk Pengungsi dan Migran. Naskah ini memupuk kerjasama internasional di antara semua aktor yang relevan dengan migrasi, mengakui bahwa tidak satupun Negara yang dapat menangani persoalan migrasi sendirian, dan menjunjung tinggi kedaulatan Negara-negara dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum internasional.

VISI DAN PRINSIP PEMANDU

8. Global Compact ini merupakan wujud dari komitmen bersama kami untuk meningkatkan kerjasama dalam migrasi internasional. Migrasi telah menjadi bagian dari pengalaman manusia sepanjang sejarah, dan kami memahaminya sebagai sumber kemakmuran, inovasi dan pembangunan berkelanjutan dalam dunia yang mengglobal, dan bahwa dampak positif ini dapat dioptimalkan dengan meningkatkan tata kelola migrasi. Sebagian besar migran di seluruh dunia saat ini bepergian, hidup dan bekerja dengan cara yang aman, tertib, dan teratur. Namun demikian, migrasi tidak dapat disangkal telah mempengaruhi negara-negara kita, komunitas, dan migran beserta keluarganya dengan cara yang sangat berbeda-beda dan terkadang tidak terduga.

9. Tantangan dan peluang migrasi internasional hendaknya menyatukan , dan bukan memecah belah kita. Global Compact ini menggariskan pemahaman bersama,

tanggung jawab bersama, dan kepaduan tujuan terkait migrasi, untuk menjadikannya berjalan baik bagi semua.

Pemahaman Bersama

10. Global Compact dihasilkan melalui kaji ulang yang belum pernah dilakukan sebelumnya terhadap bukti dan data yang dihimpun melalui proses yang terbuka, transparan dan inklusif. Kami telah berbagi realita dan menyerap beragam pendapat, guna memperkaya dan membangun pemahaman bersama terhadap gejala yang rumit ini. Kami mempelajari bahwa migrasi merupakan ciri utama dari dunia yang mengglobal, menghubungkan masyarakat dalam dan lintas wilayah-wilayah dunia, yang menjadikan kita semua adalah negara asal, negara persinggahan, dan negara tujuan. Kami menyadari adanya kebutuhan yang berkelanjutan akan upaya internasional untuk membangun pengetahuan dan analisis terhadap migrasi, karena pemahaman bersama akan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang membuka potensi bagi pembangunan berkelanjutan bagi semua. Kita harus mengumpulkan dan menyebarkan data berkualitas. Harus memastikan bahwa migran dan calon migran mendapatkan informasi penuh tentang hak-hak mereka, kewajiban mereka dan pilihan yang tersedia untuk migrasi yang aman, tertib dan reguler, serta menyadari risiko dari migrasi yang tak-reguler. Kita harus pula menyediakan bagi semua warga negara akses informasi yang obyektif, berlandaskan bukti, dan jelas, tentang manfaat dan tantangan migrasi, dengan tujuan untuk menghapuskan narasi menyesatkan yang membangkitkan persepsi negatif tentang migran.

Tanggung jawab bersama

11. Global Compact ini menawarkan pandangan 360 derajat tentang migrasi internasional dengan menyimak bahwa diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengoptimalkan manfaat keseluruhan migrasi, sambil mengatasi risiko dan tantangannya bagi individu dan komunitas di negara asal, negara persinggahan, dan negara tujuan. Tidak satu negara pun dapat mengatasi tantangan dan peluang dari gejala global ini semata sendirian. Dengan pendekatan komprehensif ini, kami bertujuan untuk memfasilitasi migrasi yang aman, tertib dan reguler, sambil mengurangi kejadian dan dampak negatif dari migrasi tak-reguler melalui kerjasama

internasional dan paduan langkah-langkah penanganan yang diajukan dalam Global Compact ini. Kami mengakui tanggung jawab bersama masing-masing kami terhadap yang lain sebagai Negara Anggota PBB untuk menjawab kebutuhan dan kekhawatiran satu sama lain terhadap migrasi, serta mengakui kewajiban menyeluruh untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia semua migran, terlepas dari status migrasi mereka, sambil memajukan keselamatan dan kemakmuran segenap masyarakat.

12. Global Compact ini bertujuan untuk mengurangi faktor pendorong dan struktural yang menghambat orang untuk mengembangkan dan mempertahankan mata pencaharian yang berkelanjutan di negara asal mereka, yang memaksa mereka untuk mencari masa depan di tempat yang lain. Dimaksudkan untuk mengurangi risiko dan kerentanan yang dihadapi para migran pada berbagai tahap dari migrasi dengan menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia mereka serta menyediakan perawatan dan bantuan bagi mereka. Mengupayakan untuk mengatasi kesusahan yang memang absah dari masyarakat, dengan mengindahkan bahwa masyarakat tengah menghadapi perubahan demografi, ekonomi, sosial dan lingkungan pada skala yang berbeda yang dapat berdampak serta merupakan buah dari migrasi. Mengupayakan untuk menciptakan kondisi kondusif yang memungkinkan semua migran untuk memperkaya masyarakat melalui kapasitas manusia, ekonomi dan sosial mereka, dan dengan demikian membantu agar andil mereka berguna bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Kepaduan Tujuan

13. Global Compact ini mengakui bahwa migrasi yang aman, tertib, dan reguler akan dapat berjalan baik bagi semua apabila berlangsung melalui cara yang terinformasi, terencana, dan berdasarkan kesepakatan. Migrasi mestinya bukanlah tindakan akibat keputusan. Bilamana terjadi demikian, kita harus bekerja sama dalam menanggapi kebutuhan para migran yang dalam situasi kerentanan, dan mengatasi masing-masing tantangan tersebut. Kita harus bekerja sama untuk mewujudkan kondisi yang memungkinkan komunitas dan individu untuk hidup dengan aman dan bermartabat di negara mereka sendiri. Kita harus menyelamatkan nyawa dan menjauhkan migran dari jalan yang berbahaya. Kita harus memberdayakan migran untuk sepenuhnya

menjadi anggota masyarakat, menegaskan andil positif mereka, serta mendorong inklusi dan kepaduan masyarakat. Kita mesti meningkatkan derajat keterdugaan dan kepastian dari Negara, masyarakat, dan migran. Untuk mencapainya, kami berkomitmen untuk memfasilitasi dan memastikan migrasi yang aman, tertib, dan reguler demi kepentingan semua.

14. Keberhasilan akan bergantung pada saling kepercayaan, tekad, dan solidaritas dari Negara-negara untuk memenuhi tujuan dan komitmen yang terkandung dalam Global Compact ini. Kami bersatu, dalam semangat kerjasama yang semua-menang, untuk mengatasi tantangan dan peluang dari migrasi dalam segenap dimensinya melalui tanggungjawab bersama dan pemecahan inovatif. Dalam semangat tujuan-bersama ini, kita mengayun langkah bersejarah ini, dengan kesadaran penuh bahwa Global Compact untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Reguler ini merupakan tonggak sejarah, namun bukanlah akhir dari upaya kami. Kami berkomitmen untuk melanjutkan dialog multilateral PBB melalui tindak lanjut dan mekanisme peninjauan-kembali yang berkala dan efektif, guna memastikan bahwa yang tertera dalam dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata untuk kepentingan jutaan orang di seluruh wilayah dunia.

15. Kami bersetuju bahwa Global Compact ini didasarkan pada serangkaian prinsip pemandu berikut ini yang saling beririsan dan saling bergantung:

Berpusat pada manusia: Global Compact menyerap dimensi manusia yang kuat ke dalamnya, yang melekat pada pengalaman migrasi itu sendiri. Prinsip ini mengusung kesejahteraan dari migran dan anggota komunitas di negara asal, negara persinggahan, dan negara tujuan. Karenanya, Global Compact meletakkan orang pada inti prinsipnya.

Kerjasama internasional: Global Compact adalah kerangka kerjasama yang tidak mengikat secara hukum yang mengakui bahwa tak satu Negara pun dapat menanganinya semata sendirian karena sifat transnasional yang melekat pada gejala migrasi ini. Maka dibutuhkanlah kerja sama dan dialog internasional, regional dan bilateral. Kewenangannya berpijak pada kesediaan, kredibilitas, kepemilikan bersama; dan pelaksanaan, tindak lanjut serta peninjauan kembali secara bersama-sama.

Kedaulatan nasional: Global Compact menegaskan kembali bahwa hak kedaulatan Negara dalam kebijakan migrasi nasional serta hak hak prerogatif untuk mengatur migrasi di dalam wilayah hukumnya, seluruhnya berkesesuaian dengan hukum internasional. Dalam wilayah kedaulatannya, Negara dapat memperbedakan status migrasi reguler dan tak-reguler, termasuk menentukan tindakan legislatif dan kebijakannya dalam melaksanakan Global Compact, dengan mempertimbangkan ragam kenyataan di tingkat nasional, kebijakan, prioritas dan pemberlakuan ketentuan yang berbeda-beda menyangkut syarat untuk masuk, tinggal dan bekerja, agar sesuai dengan hukum internasional.

Kepatuhan hukum dan proses hukum yang seksama: Global Compact mengakui bahwa penghormatan terhadap aturan hukum, proses hukum yang seksama, dan akses terhadap keadilan merupakan landasan dasar bagi semua aspek dari tata kelola migrasi. Hal ini berarti bahwa Negara, lembaga dan badan serta badan publik dan swasta, termasuk orang-orang seluruhnya bertanggung jawab di depan undang-undang yang dicanangkan secara terbuka, dilaksanakan secara adil, dan disidangkan dalam pengadilan yang independen, dan konsisten dengan hukum internasional.

Pembangunan berkelanjutan: Global Compact berakar pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, dan dibangun di atas pengakuannya bahwa migrasi adalah kenyataan multidimensional yang khususnya relevan untuk pembangunan berkelanjutan di negara-negara asal, negara persinggahan, dan negara tujuan, yang membutuhkan tanggapan yang terpadu dan menyeluruh. Migrasi memberikan sumbangan terhadap hasil-hasil positif pembangunan dan terhadap perwujudan tujuan-tujuan dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, terutama bila dikelola dengan benar. Global Compact bertujuan untuk meningkatkan potensi migrasi dalam pencapaian seluruh Sasaran Pembangunan Berkelanjutan, serta memperkuat dampak dari capaian tersebut terhadap migrasi di masa depan.

Hak asasi manusia: Global Compact didasarkan pada hukum hak asasi manusia internasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip non-regresi dan non-diskriminasi. Dengan menerapkan Global Compact, kami memastikan penghormatan, perlindungan

dan pemenuhan hak asasi manusia yang efektif bagi semua migran, terlepas dari status migrasinya, di semua tahap dalam daur migrasi. Kami juga menegaskan kembali komitmen untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi, termasuk rasisme, xenofobia, dan intoleransi terhadap migran dan keluarganya.

Tanggap gender: Global Compact memastikan bahwa hak asasi perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dihormati di semua tahap migrasi, kebutuhan khusus mereka dipahami dan ditangani secara tepat dan mereka diberdayakan sebagai agen perubahan. Global Compact mengarusutamakan perspektif gender, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan, mengakui kebebasan, kemandirian, dan kepemimpinan mereka, guna menghindarkan diri dari penanganan permasalahan perempuan migran yang melulu berpandangan bahwa perempuan adalah korban.

Peka terhadap anak: Global Compact mempromosikan kewajiban hukum internasional terkait hak-hak anak, dan setiap saat menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik anak, sebagai pertimbangan utama dalam semua situasi yang menyangkut anak dalam konteks migrasi internasional, termasuk anak-anak yang tidak didampingi dan terpisahkan.

Pendekatan seluruh-pemerintahan: Global Compact berpandangan bahwa migrasi merupakan kenyataan multidimensional yang tidak dapat ditangani melalui satu sektor kebijakan saja di dalam tubuh pemerintah. Untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan praktik migrasi yang efektif, diperlukan pendekatan seluruh-pemerintahan, guna memastikan kepaduan kebijakan secara horizontal dan vertikal di semua sektor dan jenjang dalam pemerintahan.

Pendekatan seluruh-masyarakat: Global Compact mempromosikan kemitraan multi-pihak yang luas untuk menangani migrasi dalam segenap dimensinya dengan melibatkan migran, diaspora, komunitas lokal, masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, anggota parlemen, serikat buruh, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, media dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam tata kelola migrasi.

KERANGKA KERJASAMA KAMI

16. Melalui Deklarasi New York untuk Pengungsi dan Migran ini, kami mengadopsi suatu deklarasi politik dan sejumlah komitmen. Menegaskan kembali Deklarasi tersebut dalam keseluruhannya, kami menyusunnya dengan meletakkan kerangka kerjasama berikut yang memuat 23 butir tujuan, pelaksanaan, serta tindak lanjut dan kaji ulangnya. Setiap butir tujuan memuat komitmen, dilengkapi dengan sejumlah tindakan yang dipertimbangkan akan relevan untuk membangun perangkat kebijakan dan praktek terbaik. Untuk memenuhi 23 tujuan itu, kami akan mengacu pada rencana tindakan tersebut, guna mewujudkan migrasi yang aman, tertib, dan reguler dalam seluruh daur migrasi.

Rumusan Tujuan untuk Migrasi yang Aman, Tertib dan Reguler

- (1) Menghimpun dan menggunakan data yang akurat dan terpilah sebagai dasar untuk perumusan kebijakan yang berlandaskan bukti
- (2) Mengurangi faktor pendorong dan faktor struktural merugikan, yang memaksa orang meninggalkan negara asalnya
- (3) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat-waktu menyangkut semua tahap dari migrasi
- (4) Memastikan semua migran memiliki bukti identitas legal dan dokumentasi yang memadai
- (5) Mengupayakan tersedianya dan membuat lebih lentur lagi jalur-jalur untuk migrasi reguler
- (6) Mendorong pengerahan (rekrutmen) yang adil dan etis serta menjaga kondisi untuk memastikan terwujudnya kerja layak
- (7) Mengatasi dan mengurangi kerentanan-kerentanan dalam migrasi
- (8) Menyelamatkan nyawa dan membangun upaya internasional terkoordinasi untuk menangani migran yang hilang
- (9) Memperkuat tanggapan transnasional terhadap penyelundupan migran
- (10) Mencegah, memerangi dan memberantas perdagangan orang dalam konteks migrasi internasional
- (11) Mengelola perbatasan secara terpadu, aman dan terkoordinasi
- (12) Meningkatkan derajat kepastian dan keterdugaan dalam prosedur migrasi dalam hal proses pemeriksaan, penilaian dan rujukan secara seksama

- (13) Hanya menggunakan penahanan migrasi sebagai pilihan terakhir dan mengupayakan cara lainnya
- (14) Meningkatkan perlindungan, bantuan, dan kerja sama konsuler pada seluruh daur migrasi
- (15) Menyediakan akses terhadap layanan dasar bagi migran
- (16) Memberdayakan migran dan masyarakat untuk mewujudkan inklusi yang sepenuhnya dan kepaduan sosial
- (17) Menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan mendorong wacana publik yang berbasis bukti untuk membangun persepsi terhadap migrasi
- (18) Mengembangkan keterampilan dan memfasilitasi pengakuan timbal-balik terhadap keterampilan, kualifikasi dan kompetensi
- (19) Menciptakan kondisi agar migran dan diaspora dapat berkontribusi penuh terhadap pembangunan berkelanjutan di semua negara
- (20) Mendorong pengiriman remitansi yang lebih cepat, aman dan murah serta mendukung inklusi keuangan bagi migran
- (21) Bekerja sama dalam memfasilitasi proses pemulangan dan penerimaan kembali yang aman dan bermartabat, serta reintegrasi berkelanjutan
- (22) Membangun mekanisme agar hak atas jaminan sosial dan manfaat sosial dapat dipindahkan antar negara
- (23) Memperkuat kerja sama internasional dan kemitraan global untuk migrasi yang aman, tertib, dan reguler

TUJUAN DAN KOMITMEN

TUJUAN 1: Menghimpun dan menggunakan data yang akurat dan terpilah sebagai dasar untuk perumusan kebijakan yang berlandaskan bukti

17. Kami berkomitmen untuk memperkuat landasan bukti-bukti global dari migrasi internasional melalui perbaikan dan penambahan investasi untuk pengumpulan, analisis dan penyebaran data yang akurat, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, status migrasi dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks nasional, seraya menjunjung hak privasi di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan melindungi data pribadi. Selanjutnya kami

berkomitmen untuk memastikan agar data ini dapat memperkuat penelitian, memandu penyusunan kebijakan yang terpadu dan berbasis bukti serta membentuk wacana publik yang terinformasi dengan baik, dan memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan komitmen dari waktu ke waktu.

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

- a) Menggali dan menerapkan strategi komprehensif untuk memperbaiki data migrasi di tingkat lokal, nasional, regional dan global, dengan kesertaan semua pemangku kepentingan yang relevan, di bawah bimbingan Komisi Statistik PBB, dengan menyelaraskan metodologi pengumpulan data, dan memperkuat analisis dan penyebaran data dan indikator terkait migrasi
- b) Memperbaiki data statistik migrasi dan sistem data nasional agar dapat diperbandingkan dan berkesesuaian, termasuk dengan terus mengembangkan dan menerapkan definisi statistik dari migran internasional, mengembangkan suatu standar untuk memahami besaran dan aliran migran, dan mencatat pola dan tren migrasi, ciri-ciri migran, serta pendorong dan dampak dari migrasi
- c) Mengembangkan program global untuk membangun dan meningkatkan kapasitas nasional dalam pengumpulan, analisis dan penyebaran data; untuk berbagi data, mengatasi kesenjangan data dan menilai tren migrasi utama, yang mendorong kerjasama antar pemangku kepentingan yang relevan di semua tingkatan; menyediakan pelatihan khusus, dukungan keuangan dan bantuan teknis, memanfaatkan sumber data baru, termasuk data raksasa (*big data*), dan secara teratur ditinjau oleh Komisi Statistik PBB
- d) Menghimpun, menganalisis, dan menggunakan data tentang dampak dan manfaat migrasi, serta kontribusi migran dan diaspora terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan untuk menginformasikan pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 serta strategi dan program yang terkait, di tingkat lokal, nasional, regional dan global
- e) Mendukung pengembangan dan kerjasama lebih lanjut antar berbagai upaya membangun pangkalan data dan penyimpanan data global dan regional yang telah ada, termasuk Portal Data Migrasi Global IOM dan Kemitraan Pengetahuan Global Bank Dunia tentang Migrasi dan Pembangunan, dengan maksud untuk secara sistematis

mengkonsolidasikan data relevan secara transparan dan ramah-pengguna, sambil mendorong kerjasama antar-lembaga untuk menghindari duplikasi

f) Membangun dan memperkuat pusat-pusat regional untuk penelitian dan pelatihan tentang migrasi atau observatorium migrasi, contohnya Observatorium Afrika untuk Migrasi dan Pembangunan, untuk mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan standar PBB, termasuk untuk mempelajari praktik terbaik, kontribusi dari migran, manfaat ekonomi, sosial dan politik secara menyeluruh dan tantangan migrasi di negara asal, negara persinggahan dan negara tujuan, serta mempelajari segi pendorong migrasi, dengan maksud untuk membangun strategi bersama dan memaksimalkan manfaat dari data migrasi terpilah, dengan berkoordinasi melalui mekanisme regional dan subregional yang sudah ada

g) Meningkatkan pengumpulan data nasional dengan sesegera mungkin mengintegrasikan topik terkait migrasi ke dalam sensus nasional, seperti data negara tempat lahir, negara tempat lahir dari orang tua, negara asal kewarganegaraan, negara tempat bermukim pada lima tahun sebelum sensus, tanggal kedatangan terkini, alasan bermigrasi, untuk memastikan analisis dan penyebaran hasil yang tepat-waktu, untuk dipilah dan ditabulasi sesuai dengan standar internasional, untuk keperluan statistik

h) Melakukan survei rumah tangga, ketenagakerjaan, dan survei lainnya, untuk menghimpun informasi tentang integrasi sosial dan ekonomi dari migran atau menambahkan modul baku migrasi ke dalam survei rumah tangga yang sudah ada agar dapat diperbandingkan secara nasional, regional dan internasional, serta mengumpulkan dan menyediakan salinan data mikro yang dapat digunakan secara publik

i) Meningkatkan kerjasama antara unit-unit Negara yang bertanggung jawab atas data migrasi dengan kantor statistik nasional guna menghasilkan statistik terkait migrasi, termasuk penggunaan catatan administratif untuk keperluan statistik, seperti catatan rekaman perlintasan batas negara, visa, ijin tinggal, catatan kependudukan dan sumber lain yang relevan, dengan menjunjung tinggi hak atas privasi dan melindungi data pribadi

j) Mengembangkan dan memanfaatkan profil migrasi menurut negara, mencakup data terpilah pada semua aspek yang relevan dengan migrasi dalam konteks nasional, termasuk yang terkait dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, permintaan dan ketersediaan keterampilan, dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari migrasi, biaya pengiriman remitansi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kondisi hidup dan

kondisi kerja, upah, serta kebutuhan migran dan komunitas penerima migran, yang seluruhnya ditujukan untuk mengembangkan kebijakan migrasi yang berlandaskan bukti

k) Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang relevan di negara asal, negara persinggahan, dan negara tujuan, untuk mengembangkan penelitian, kajian dan survei tentang saling keterkaitan antara migrasi dan ketiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan, andil dan keterampilan para migran dan diaspora, serta ikatan mereka dengan negara asal dan negara tujuan

TUJUAN 2: Mengurangi faktor pendorong dan faktor struktural merugikan, yang memaksa orang meninggalkan negara asalnya

18. Kami berkomitmen untuk menciptakan kondisi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan yang kondusif sehingga orang-orang dapat menjalani kehidupan yang damai, produktif dan berkelanjutan di negara mereka sendiri serta memenuhi cita-cita pribadi mereka, sambil memastikan bahwa keputusan dan kemerosotan lingkungan bukanlah penyebab yang memaksa mereka untuk mencari mata pencaharian di tempat lain melalui migrasi tak reguler. Lebih lanjut kami berkomitmen memastikan pelaksanaan yang tepat waktu dan sepenuhnya dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, juga membangun dan berinvestasi untuk pelaksanaan kerangka kerja yang lainnya, agar memperbesar dampak keseluruhan dari Global Compact untuk memfasilitasi migrasi yang aman, tertib dan reguler.

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

a) Memajukan penerapan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, termasuk Sasaran Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda Aksi Addis Ababa, dan komitmen untuk mendahulukan yang paling tertinggal, serta Perjanjian Paris⁴ dan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Resiko Bencana 2015-2030

b) Berinvestasi dalam program-program agar Negara-negara untuk mempercepat pemenuhan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan dengan tujuan untuk menghapuskan faktor pendorong dan faktor struktural merugikan yang memaksa orang meninggalkan

⁴ Diadopsi oleh UNFCCC dalam FCCC/CP/2015/10/Add.1, keputusan 1/CP.21.

negara asal mereka, termasuk melalui upaya pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, infrastruktur, pembangunan perkotaan dan pedesaan, penciptaan lapangan kerja, kerja layak, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, ketahanan dan pengurangan risiko bencana, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengatasi dampak sosial-ekonomi dari semua bentuk kekerasan, nondiskriminasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, akses terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, serta menciptakan dan merawat masyarakat yang damai dan inklusif dengan lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan

c) Menegakkan atau memperkuat mekanisme untuk memantau dan mengantisipasi pembesaran risiko dan ancaman yang mungkin memicu atau mempengaruhi gerak migrasi, memperkuat sistem peringatan dini, mengembangkan prosedur dan perangkat bantu untuk keadaan darurat, meluncurkan operasi darurat, dan mendukung pemulihan pasca darurat, dengan kerjasama erat dan dukungan dari Negara-negara lain, pemegang kewenangan nasional dan lokal yang relevan, Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional, dan masyarakat sipil

d) Berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional di semua wilayah, yang memungkinkan semua orang untuk meningkatkan kehidupan dan memenuhi cita-cita mereka, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, termasuk melalui penanaman modal swasta dan penanaman modal asing langsung dan preferensi perdagangan, untuk menciptakan kondisi kondusif yang memungkinkan masyarakat dan individu untuk memanfaatkan peluang di negara mereka sendiri dan mendorong pembangunan berkelanjutan

e) Investasi dalam pengembangan manusia dengan mempromosikan kewirausahaan, pendidikan, pelatihan kejuruan dan program pengembangan keterampilan dan kemitraan, penciptaan lapangan kerja produktif, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta bekerjasama dengan sektor swasta dan serikat buruh, dengan maksud untuk mengurangi pengangguran kaum muda, menghindarkan terkurasnya kaum terpelajar dan mengoptimalkan yang diperoleh di negara asal, serta memanfaatkan bonus demografi

f) Memperkuat kerjasama antara aktor-aktor kemanusiaan dan pembangunan, termasuk dengan mempromosikan analisis bersama, menggunakan pendekatan multi-donor dan daur pendanaan tahun-jamak, untuk mengembangkan tanggapan dan

capaian jangka panjang yang memastikan penghormatan terhadap hak-hak individu yang terdampak, ketahanan dan kemampuan masyarakat untuk mengatasinya, juga kemandirian ekonomi dan sosialnya, dan dengan memastikan semua upaya ini memasukkan segi migrasi dalam pertimbangannya

g) Memperhitungkan migran dalam kesiapan dan tanggap darurat nasional, termasuk mempertimbangkan rekomendasi yang relevan dari proses konsultasi yang dipimpin oleh negara, seperti Pedoman untuk Melindungi Migran di Negara yang Mengalami Konflik atau Bencana Alam (Pedoman MICIC)

Bencana alam, dampak merugikan dari perubahan iklim, dan kemerosotan lingkungan

h) Mendorong analisis bersama dan berbagi informasi bersama, guna lebih baik lagi dalam memetakan, memahami, memprediksi, dan mengatasi gerak migrasi, seperti migrasi yang terjadi karena bencana alam yang tiba-tiba dan yang berangsur-angsur, dampak merugikan dari perubahan iklim, kemerosotan lingkungan, serta situasi genting lainnya, sambil memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang efektif bagi semua migran

i) Mengembangkan strategi adaptasi dan ketahanan terhadap bencana alam yang tiba-tiba dan berangsur-angsur, dampak merugikan dari perubahan iklim, dan kemerosotan lingkungan, seperti penggurunan, merosotnya kesuburan tanah, kekeringan dan kenaikan permukaan laut, dengan mempertimbangkan akibat potensialnya terhadap migrasi, sambil tetap mengakui bahwa adaptasi di negara asal merupakan yang terutama

j) Memasukkan segi perpindahan orang sebagai pertimbangan dalam strategi kesiagaan menghadapi bencana dan meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga dan negara terkait lainnya untuk peringatan dini, menyiapkan rencana darurat, lumbung persediaan, mekanisme koordinasi, perencanaan evakuasi, pengaturan untuk menerima dan membantu orang-orang yang berpindah, dan penyediaan informasi publik

k) Menyelaraskan dan mengembangkan pendekatan dan mekanisme di tingkat subregional dan regional untuk mengatasi kerentanan orang-orang yang terkena dampak bencana alam yang tiba-tiba dan berangsur-angsur, dengan memastikan bahwa mereka yang terdampak memiliki akses ke bantuan kemanusiaan yang

memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan sepenuhnya menghormati hak-hak mereka dimanapun mereka berada, dan dengan capaian hasil berkelanjutan yang memperkuat ketahanan dan kemandirian, dengan mempertimbangkan kapasitas semua negara yang terlibat

l) Mengembangkan pendekatan terpadu untuk mengatasi tantangan dari gerak migrasi dalam konteks bencana alam yang tiba-tiba dan berangsur-angsur, termasuk dengan mempertimbangkan rekomendasi yang relevan dari proses konsultasi yang dipimpin oleh Negara, seperti Agenda Perlindungan dari Orang yang Berpindah dalam Konteks Konteks Bencana dan Perubahan Iklim, dan Platform tentang Perpindahan Orang akibat Bencana

TUJUAN 3: Menyediakan informasi yang akurat dan tepat-waktu menyangkut semua tahap dari migrasi

19. Kami berkomitmen untuk memperkuat upaya kami untuk menyediakan informasi, membuatnya tersedia dan tersebar, yang akurat, tepat waktu, dapat diakses, dan transparan mengenai aspek-aspek terkait migrasi untuk dan antar Negara, bagi masyarakat dan migran di semua tahap migrasi. Kami lebih lanjut berkomitmen untuk menggunakan informasi ini untuk menyusun kebijakan migrasi yang memberikan tingkat keterdugaan dan kepastian yang tinggi untuk semua aktor yang terlibat.

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

- a) Meluncurkan dan menerbitkan situs web nasional yang terpusat dan dapat diakses oleh publik agar tersedia pilihan informasi tentang migrasi reguler, seperti undang-undang dan kebijakan imigrasi menurut negara, persyaratan visa, tata-cara pengajuan, persyaratan izin kerja, biaya dan kriteria konversi, persyaratan izin kerja, kualifikasi profesional, penilaian kemampuan dan penyetaraannya, kesempatan mendapatkan pelatihan dan bersekolah, biaya hidup dan kondisi hidup, agar informasi tersebut tersedia bagi migran untuk mengambil keputusan
- b) Memajukan dan meningkatkan kerjasama dan dialog bilateral, regional, dan internasional yang sistematis untuk bertukar informasi tentang tren terkait migrasi, termasuk melalui pangkalan data bersama, platform dalam jaringan (*online*), pusat

pelatihan internasional dan jaringan penghubung, dengan menjunjung hak atas privasi dan melindungi data pribadi

c) Membangun titik-titik informasi yang terbuka dan dapat diakses di sepanjang rute migrasi yang relevan agar migran mendapatkan rujukan untuk dukungan, dan konseling yang peka anak dan tanggap gender, yang memungkinkan migran dapat menghubungi perwakilan konsuler negara asalnya, dan menyediakan informasi yang relevan, termasuk informasi tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar, perlindungan dan bantuan yang sesuai, pilihan dan cara untuk migrasi yang reguler, dan kesempatan untuk kembali pulang, dalam bahasa yang dipahami oleh yang bersangkutan

d) Menyediakan untuk migran yang baru tiba, informasi serta bimbingan hukum sesuai sasaran yang tanggap-gender, peka-anak, dapat diakses dan bersifat menyeluruh, tentang hak-hak dan kewajiban mereka, termasuk padanannya dalam hukum nasional dan lokal, cara untuk memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal, penetapan status, pendaftaran ke petugas yang berwenang, akses terhadap keadilan untuk mengadukan pelanggaran hak, juga akses terhadap layanan-layanan dasar

e) Menggalang kampanye penyebaran informasi dalam berbagai bahasa, yang tanggap gender dan berlandaskan bukti, dan menyelenggarakan kegiatan untuk menimbulkan kesadaran dan pelatihan orientasi pra-keberangkatan di negara-negara asal, bekerja sama dengan pemerintah setempat, pihak konsulat dan perwakilan diplomatik, sektor swasta, akademisi, organisasi migran dan diaspora serta masyarakat sipil, untuk mempromosikan migrasi yang aman, tertib, dan reguler, serta menyoroti risiko dari migrasi yang tak-reguler dan yang tidak aman

TUJUAN 4: Memastikan bahwa semua migran memiliki bukti identitas legal dan dokumentasi yang memadai

20. Kami berkomitmen untuk memenuhi hak setiap individu atas identitas legal dengan memberikan bukti kewarganegaraan dan dokumentasi yang relevan kepada semua warganegara kami, agar kewenangan nasional dan lokal dapat memastikan identitas hukum dari migran saat mereka tiba, selama tinggal, dan untuk kembali, juga untuk memastikan prosedur migrasi efektif, menyediakan layanan yang efisien, dan meningkatkan keselamatan publik. Kami lebih lanjut berkomitmen untuk memastikan, melalui langkah-langkah yang tepat, bahwa migran dapat memiliki dokumentasi dan

catatan sipil yang memadai, seperti akta kelahiran, pernikahan dan kematian, pada semua tahap migrasi, sebagai sarana untuk memberdayakan para migran untuk dapat secara efektif menerapkan hak asasi manusianya.

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

- a) Meningkatkan sistem pencatatan sipil, dengan fokus khusus untuk menjangkau orang-orang tidak tercatat dan warga negara kami yang tinggal di negara lain, termasuk dengan memberikan dokumen identitas dan dokumen sipil yang relevan, memperkuat kapasitas, dan berinvestasi di bidang kemudahan teknologi informasi dan komunikasi, sambil menegakkan hak untuk privasi dan melindungi data pribadi.
- b) Menyelaraska dokumen perjalanan agar sesuai dengan rincian dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional agar dokumen perjalanan lebih mudah dibaca secara lintas-operasi dan bersifat universal, serta untuk memerangi penipuan identitas dan pemalsuan dokumen, termasuk berinvestasi dalam digitalisasi, dan memperkuat mekanisme untuk berbagi data biometrik, sambil menjunjung hak privasi dan melindungi data pribadi
- c) Memastikan dokumentasi konsuler yang memadai, tepat waktu, dapat diandalkan dan dapat diakses untuk warga negara kami yang tinggal di negara lain, termasuk dokumen identitas dan perjalanan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta melakukan penjangkauan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil
- d) Memfasilitasi akses ke dokumentasi pribadi, seperti paspor dan visa, dan memastikan bahwa peraturan dan kriteria yang relevan untuk mendapatkan dokumentasi tersebut tidaklah diskriminatif, dengan melakukan pengkajian yang peka gender dan peka usia untuk mencegah peningkatan risiko kerentanan pada seluruh daur migrasi
- e) Memperkuat langkah-langkah untuk mengurangi status tanpa kewarganegaraan, termasuk melalui pendaftaran kelahiran migran, memastikan bahwa baik perempuan dan laki-laki sama-sama dapat memperoleh kewarganegaraan bagi anak-anaknya, dan kewarganegaraan dapat diberikan kepada anak-anak yang lahir di wilayah Negara lain, terutama pada situasi bilamana langkah-langkah ini tidak diambil maka anak bersangkutan berkemungkinan tidak mendapatkan kewarganegaraan, dengan

sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dari orang berkewarganegaraan dan sesuai dengan undang-undang nasional

f) Mengkaji dan memperbaiki persyaratan untuk pembuktian kewarganegaraan di pusat-pusat layanan guna memastikan bahwa migran yang tidak memiliki bukti kewarganegaraan ataupun identitas legal tidak dikesampingkan dalam mendapatkan layanan dasar dan tidak pula hak asasi manusianya disangkal

g) Melanjutkan praktik-praktik di tingkat lokal yang mendukung partisipasi dalam kehidupan masyarakat, seperti interaksi dengan pihak berwenang dan pemberian akses terhadap layanan yang relevan, dengan menerbitkan kartu pendaftaran yang memuat data pribadi pokok bagi semua orang termasuk migran, walaupun kartu tersebut tidaklah memberikan hak kewarganegaraan atau hak untuk bermukim

TUJUAN 5: Mengupayakan tersedianya dan membuat lebih lentur lagi jalur-jalur untuk migrasi reguler

21. Kami berkomitmen untuk menyesuaikan pilihan dan jalur menuju migrasi reguler yang memudahkan mobilitas tenaga kerja dan terwujudnya kerja layak sesuai kenyataan demografi dan pasar tenaga kerja, mengoptimalkan peluang pendidikan, menjunjung tinggi hak atas kehidupan keluarga, dan menjawab kebutuhan dari migran dengan suatu kerentanan, dengan jangkauan pandangan untuk memperluas dan memperbanyak ragam cara menuju migrasi yang aman, tertib, reguler

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

a) Mengembangkan perjanjian-perjanjian bilateral, regional dan multilateral tentang mobilitas tenaga kerja, yang berlandaskan hak asasi manusia dan tanggap gender, dengan ketentuan kerja terbakukan sesuai sektor pekerjaannya, bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang relevan, dengan mengacu pada standar, pedoman dan prinsip-prinsip ILO yang relevan, sesuai dengan hukum hak asasi manusia dan hukum perburuhan internasional

b) Mempermudah mobilitas tenaga kerja regional dan lintas-regional dengan pengaturan melalui kerjasama internasional dan bilateral, misalnya rejim peraturan kemudahan berpindah, pembebasan visa atau pemberlakuan visa masuk

banyak-negara, dan kerangka kerjasama mobilitas tenaga kerja, disesuaikan dengan prioritas nasional, kebutuhan pasar lokal dan pasokan keahlian

c) Mengkaji dan memperbaiki pilihan dan jalur yang ada untuk migrasi reguler, dengan maksud untuk mengoptimalkan kecocokan keterampilan di pasar tenaga kerja, menjawab kenyataan demografi serta tantangan dan peluang pembangunan, sesuai dengan permintaan pasar kerja dan pasokan ketrampilan di tingkat lokal dan nasional, dengan berkonsultasi dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya

d) Mengembangkan skema mobilitas tenaga kerja yang lentur, yang berlandaskan hak dan tanggung gender bagi para migran, sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal dan nasional dan keahlian yang dibutuhkan di semua tingkat keterampilan, termasuk melalui program kerja sementara, musiman, sirkuler, dan program jalur cepat, ke wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan tenaga kerja, dengan menyediakan pilihan visa dan ijin yang lentur, dapat diubah, dan tidak diskriminatif, seperti visa dan ijin untuk kerja tetap dan sementara, ijin masuk berulang untuk keperluan pendidikan, bisnis, kunjungan, investasi dan kewirausahaan

e) Mempromosikan cara untuk pencocokan keterampilan bagi ekonomi nasional dengan melibatkan kewenangan setempat dan pemangku kepentingan terkait lainnya, khususnya sektor swasta dan serikat buruh, dalam analisis pasar tenaga kerja lokal, identifikasi kesenjangan keterampilan, penjabaran uraian keterampilan yang dibutuhkan, dan evaluasi terhadap ketepatan dari kebijakan migrasi tenaga kerja, untuk memastikan mobilitas tenaga kerja kontrak yang sesuai pasar melalui jalur reguler

f) Mendorong program pencocokan ketrampilan yang efisien dan efektif dengan mempersingkat waktu pengurusan visa dan ijin pada pemberian ijin kerja yang baku, serta menawarkan percepatan pengurusan visa dan ijin bagi pemberi kerja yang rekam jejaknya mencerminkan kepatuhan

g) Membangun atau mengembangkan dari praktik-praktik nasional dan regional yang sudah ada, pemberian ijin masuk atau tinggal untuk jangka waktu sewajarnya, berdasarkan belas kasih, pertimbangan kemanusiaan atau lainnya, bagi migran yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena bencana alam tiba-tiba atau yang berangsur-angsur, misalnya dengan memberikan visa kemanusiaan, sponsor pribadi, akses pendidikan bagi anak-anak, dan ijin kerja sementara, bilamana tidak dimungkinkan untuk adaptasi atau kembali ke negara asal

h) Melakukan kerjasama dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengokohkan pemecahan masalah bagi migran yang terpaksa meninggalkan negara

asalnya karena bencana alam berangsur-angsur, karena dampak buruk dari perubahan iklim, dan kemerosotan lingkungan, seperti penggurunan, kemerosotan lahan, kekeringan dan kenaikan permukaan laut, termasuk menyiapkan pemindahan terencana dan memberikan pilihan visa, bilamana tidak dimungkinkan untuk adaptasi atau kembali ke negara asal

i) Memberikan kemudahan akses pada prosedur penyatuan-kembali keluarga bagi migran dari semua tingkat keterampilan melalui langkah-langkah sesuai yang mempromosikan perwujudan hak atas kehidupan keluarga dan kepentingan terbaik anak, termasuk dengan meninjau kembali dan memperbaiki persyaratannya, seperti seperti tingkat pendapatan, kemahiran berbahasa, lamanya tinggal, ijin kerja, dan akses terhadap jaminan dan layanan sosial

j) Memperluas pilihan yang tersedia untuk mobilitas akademis, termasuk melalui perjanjian bilateral dan multilateral yang memfasilitasi pertukaran akademik, seperti beasiswa untuk pelajar dan tenaga pendidik profesional, pengajar tamu, program pelatihan bersama, dan peluang penelitian internasional, bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan terkait lainnya

TUJUAN 6: Mendorong pengerahan (rekrutmen) yang adil dan etis serta menjaga kondisi untuk memastikan terwujudnya kerja layak

22. Kami berkomitmen untuk meninjau kembali mekanisme pengerahan (rekrutmen) saat ini untuk menjaminnya agar berjalan adil dan etis, dan untuk melindungi semua pekerja migran dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan guna memastikan kerja layak dan memaksimalkan andil sosial ekonomi dari migran baik di negara asal maupun negara tujuan

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

a) Mendorong penandatanganan, ratifikasi, pengesahan dan implementasi instrumen internasional yang terkait migrasi tenaga kerja internasional, hak-hak perburuhan, kerja layak dan kerja paksa

b) Mengembangkan dari platform bilateral, subregional dan regional yang sudah ada, yang telah berhasil mengatasi hambatan dan menemukan praktik terbaik mobilitas tenaga kerja, dengan memfasilitasi dialog lintas-wilayah untuk berbagi pengetahuan

tentang hal-hal tersebut, dan untuk mempromosikan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan hak buruh migran dari semua tingkat keterampilan, termasuk pekerja rumah-tangga migran

c) Memperbaiki pengaturan agen pengerahan publik dan swasta agar selaras dengan pedoman internasional dan praktik terbaik, guna mencegah pengerah dan majikan membebankan atau mengalihkan biaya pengerahan dan biaya yang terkait dengan itu ke buruh migran, untuk mencegah penjeratan hutang, eksploitasi dan kerja paksa, termasuk dengan memberlakukan mekanisme wajib yang dapat dijalankan, agar pengaturan dan pemantauan terhadap industri pengerahan dapat dilakukan secara efektif

d) Membangun kemitraan dengan semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pengusaha, organisasi buruh migran dan serikat buruh, untuk memastikan bahwa buruh migran memiliki kontrak tertulis serta memahami ketentuan yang tertera dalam kontrak, memahami peraturan tentang pengerahan tenaga kerja internasional dan peraturan kerja di negara tujuan, hak dan kewajiban mereka, dan cara mengakses mekanisme pengaduan dan ganti rugi yang efektif, dalam bahasa yang mereka pahami

e) Memberlakukan dan menjalankan undang-undang nasional yang menghukum pelanggaran atas hak asasi manusia dan hak perburuhan, terutama untuk kasus kerja paksa dan pekerja anak, serta bekerja sama dengan sektor swasta, termasuk pengusaha, pengerah, subkontraktor dan pemasok, untuk membangun kemitraan yang mempromosikan kondisi kerja layak, mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi, dan memastikan bahwa peran dan tanggung jawab dalam proses pengerahan dan penempatan diuraikan dengan jelas, sehingga meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan

f) Memperkuat penegakan peraturan pengerahan yang adil dan etis dan norma kerja layak dengan meningkatkan kemampuan pengawas ketenagakerjaan dan pemegang kewenangan lainnya agar mampu lebih baik lagi dalam memantau pengerah, majikan dan penyedia layanan di semua sektor, memastikan bahwa hukum hak asasi manusia dan hukum perburuhan internasional diindahkan guna mencegah semua bentuk eksploitasi, perbudakan, perhambaan, serta kerja paksa, kerja wajib atau pekerja anak

g) Mengembangkan dan memperkuat migrasi tenaga kerja dan proses pengerahan yang adil dan etis, yang memudahkan migran berpindah majikan dan mengubah persyaratan atau lamanya tinggal dengan beban administrasi minimal, sambil

memperbesar peluang untuk kerja layak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum perburuhan internasional .

h) Mengambil langkah-langkah yang melarang penyitaan atau penahanan tanpa persetujuan terhadap kontrak kerja, dan dokumen perjalanan atau dokumen identitas dari migran untuk mencegah pelanggaran, eksploitasi dalam semua bentuknya, kerja paksa, kerja wajib dan pekerja anak, pemerasan, dan kondisi ketergantungan lainnya, serta untuk memungkinkan buruh migran dapat sepenuhnya menerapkan hak asasi mereka

i) Memberikan kepada buruh migran yang terikat dalam kerja upahan dan buruh kontrak, hak perburuhan dan perlindungan yang sama sebagaimana yang diberikan kepada semua buruh di sektor tersebut, seperti hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, untuk mendapatkan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, atas kebebasan berkumpul secara damai dan membentuk perhimpunan, atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, termasuk melalui mekanisme perlindungan upah, dialog sosial dan keanggotaan dalam serikat buruh

j) Menjamin bahwa migran yang bekerja di ekonomi informal secara aman dapat menempuh mekanisme pelaporan, pengaduan, dan ganti rugi yang efektif dalam kasus eksploitasi, pelecehan atau pelanggaran hak di tempat kerja, dengan cara yang tidak memperburuk kerentanan dari migran yang mengecam kejadian pelanggaran semacam itu dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses hukum baik di negara asal ataupun negara tujuan

k) Meninjau ulang undang-undang, kebijakan dan program ketenagakerjaan yang relevan, untuk memastikan bahwa seluruhnya mempertimbangkan kebutuhan khusus dan andil dari perempuan pekerja migran, khususnya yang dipekerjakan pada kerja rumah tangga dan pekerjaan dengan keterampilan lebih rendah, serta dicantumkannya langkah-langkah khusus guna mencegah, melaporkan, menyelesaikan dan menyediakan pemulihan yang efektif dari semua bentuk eksploitasi dan pelecehan, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, sebagai landasan untuk mendorong kebijakan mobilitas tenaga kerja yang tanggap gender

l) Mengembangkan dan meningkatkan kebijakan dan program nasional yang berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja internasional, termasuk dengan mempertimbangkan rekomendasi yang relevan dari Prinsip-Prinsip Umum dan Pedoman Operasional ILO untuk Pengerahan yang Adil, Prinsip Panduan PBB

tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Sistem Integritas Pengerahan Internasional dari IOM (IRIS)

TUJUAN 7: Mengatasi dan mengurangi kerentanan-kerentanan dalam migrasi

23. Kami berkomitmen menanggapi kebutuhan migran yang menghadapi situasi kerentanan yang mungkin ditimbulkan oleh keadaan di perjalanan atau di negara asal, negara persinggahan, dan negara tujuan, dengan membantu dan melindungi hak asasi mereka, sesuai dengan kewajiban kami menurut hukum internasional. Kami lebih lanjut berkomitmen untuk menjunjung tinggi kepentingan terbaik anak pada setiap saat sebagai pertimbangan utama dalam situasi yang menyangkut anak dan untuk menerapkan pendekatan yang tanggap gender dalam mengatasi kerentanan, termasuk dalam menanggapi perpindahan orang karena paduan beragam sebab

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

- a) Meninjau kembali untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang relevan tidak menyebabkan, memperburuk atau tanpa sengaja menambah kerentanan migran, termasuk melalui penerapan pendekatan yang berlandaskan hak asasi manusia, tanggap gender dan disabilitas sertapeka terhadap usia dan anak
- b) Menegakkan kebijakan yang komprehensif dan mengembangkan kemitraan agar migran yang berada dalam situasi kerentanan, terlepas dari status migrasi mereka, terbantu di semua tahap migrasi, melalui identifikasi, bantuan, dan perlindungan hak asasi manusia para migran, khususnya pada kasus yang berkaitan dengan perempuan dengan risiko, anak-anak terutama yang tidak didampingi atau terpisahkan dari keluarganya, mereka yang berasal dari minoritas etnis dan agama, korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, mereka yang didiskriminasi atas dasar apapun, masyarakat adat, pekerja yang menghadapi eksploitasi dan pelecehan, pekerja rumah tangga, korban perdagangan orang, dan mereka yang mengalami eksploitasi dan pelecehan dalam konteks penyelundupan migran
- c) Mengembangkan kebijakan migrasi tanggap gender, untuk mengatasi kebutuhan dan kerentanan khusus migran perempuan, anak perempuan dan anak lelaki, yang dapat melingkupi layanan berupa bantuan, perawatan kesehatan, layanan psikologis

dan bimbingan lainnya, serta akses terhadap keadilan dan pemulihan yang efektif, terutama dalam kasus kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual dan kekerasan berbasis gender

d) Meninjau ulang undang-undang perburuhan dan kondisi kerja untuk mengidentifikasi dan secara efektif serta mengatasi kerentanan dan pelanggaran yang terkait dengan tempat kerja pada semua tingkat keterampilan, termasuk pada kerja rumah tangga, pada mereka yang bekerja di ekonomi informal, bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang relevan, terutama sektor swasta

e) Memasukkan anak migran ke dalam sistem perlindungan anak nasional dengan menetapkan prosedur yang seksama pada seluruh proses dan keputusan di bidang perundangan, administrasi dan peradilan yang relevan, serta dalam semua kebijakan dan program di bidang migrasi yang berdampak pada anak, termasuk dalam kebijakan perlindungan dan layanan konsuler, serta pada penyusunan kerangka kerja kerjasama lintas batas, untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak terintegrasi secara tepat, ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten, dengan koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang berwenang dalam perlindungan anak

f) Memberikan perlindungan pada semua tahap migrasi bagi anak yang tidak didampingi dan terpisahkan, dengan menegakkan suatu prosedur khusus untuk identifikasi, rujukan, perawatan dan penyatuan kembali keluarga, dan memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan, termasuk kesehatan mental, pendidikan, bantuan hukum dan hak untuk didengar dalam proses administrasi dan peradilan, termasuk untuk dengan segera menunjuk wali hukum yang kompeten dan tidak memihak, sebagai sarana untuk mengatasi kerentanan dan diskriminasi yang khususnya mereka hadapi, untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, serta memberikan akses kepada pemecahan berkelanjutan yang terbaik bagi mereka

g) Memastikan agar para migran memiliki akses terhadap bantuan dan pengacara publik yang independen atau terjangkau dalam proses hukum yang mempengaruhi mereka, termasuk selama persidangan peradilan atau administratif yang terkait, untuk memastikan agar semua migran, di mana pun berada, diakui di hadapan hukum dan agar peradilan berlangsung secara tidak memihak dan tidak diskriminatif

h) Mengembangkan prosedur yang mudah diakses dan ringkas, yang memudahkan peralihan dari satu status ke lainnya, dan menginformasikan migran tentang hak dan kewajiban mereka, agar mereka tidak terperosok ke dalam status tak-reguler di negara

tujuan, untuk mengurangi status kedaruratan dan kerentanan yang terkait dengannya, serta memungkinkan dilakukannya penilaian orang per orang terhadap migran, termasuk bagi mereka yang terlempar dari status reguler, tanpa membuat yang bersangkutan merasa takut mengalami pengusiran sewenang-wenang

i) Membangun dari praktik yang ada, kemudahan akses bagi para migran dengan status tak-reguler untuk mengikuti penilaian orang per orang guna membantu mengarahkan mereka menuju status reguler, dengan penilaian kasus per kasus serta kriteria yang jelas dan transparan, khususnya pada kasus yang melibatkan anak-anak, remaja dan keluarga, sebagai pilihan untuk mengurangi kerentanan, demikian pula bagi Negara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang populasi penduduknya

j) Menerapkan langkah-langkah dukungan khusus untuk memastikan bahwa migran yang terperangkap dalam situasi krisis di negara persinggahan dan negara tujuan memiliki akses ke perlindungan konsuler dan bantuan kemanusiaan, termasuk dengan melancarkan kerjasama lintas batas dan kerjasama internasional yang lebih luas, serta dengan memperhatikan populasi migran dalam kesiap-siagaan menghadapi krisis, tanggapan terhadap kedaruratan, dan tindakan paska krisis

k) Melibatkan kewenangan lokal dan pemangku kepentingan yang relevan dalam identifikasi, rujukan dan bantuan bagi migran dalam situasi kerentanan, termasuk dengan menyusun perjanjian dengan badan-badan perlindungan nasional, penyedia bantuan hukum dan layanan, juga melalui pelibatan -jika ada- tim tanggap darurat bergerak

l) Mengembangkan kebijakan dan program nasional untuk menyempurnakan tanggapan nasional yang menyoar kebutuhan dari migran yang dalam situasi kerentanan, termasuk dengan mempertimbangkan rekomendasi yang relevan dari Prinsip dan Pedoman dari Kelompok Migrasi Global, Didukung oleh Panduan Praktis, tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dari Migran dalam Situasi Rentan

TUJUAN 8: Menyelamatkan nyawa dan membangun upaya internasional terkoordinasi untuk masalah migran yang hilang

24. Kami berkomitmen untuk menjalin kerjasama internasional untuk menyelamatkan nyawa serta mencegah migran dari kematian dan cedera melalui operasi pencarian dan penyelamatan secara individual dan secara bersama-sama,

melakukan pengumpulan dan pertukaran informasi relevan secara terbuka, memperlakukan upaya penyelamatan nyawa seluruh migran sebagai tanggungjawab bersama, sesuai dengan hukum internasional. Kami selanjutnya berkomitmen untuk mengidentifikasi mereka yang telah meninggal atau hilang, dan mengupayakan komunikasi dengan keluarga yang terdampak.

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

- a) Mengembangkan prosedur dan perjanjian mengenai pencarian dan penyelamatan migran, dengan tujuan utama untuk melindungi hak hidup dari migran dengan mengindahkan larangan melakukan pengusiran kolektif, menjamin berlangsungnya proses yang seksama dan penilaian orang per orang, memperbesar kapasitas untuk menerima dan membantu migran, dan memastikan bahwa pemberian bantuan kepada migran yang semata atas alasan kemanusiaan tidaklah dianggap sebagai tindakan pelanggaran hukum
- b) Meninjau ulang dampak dari kebijakan dan undang-undang terkait migrasi untuk memastikannya tidak menimbulkan atau menciptakan risiko hilangnya migran, termasuk dengan mengidentifikasi jalur-jalur persinggahan berbahaya yang dilalui migran, bekerjasama dengan Negara lain dan pemangku kepentingan yang relevan serta organisasi internasional untuk mengidentifikasi risiko kontekstual dan membangun suatu mekanisme guna mencegah dan menanggapi situasi demikian, dengan memberikan perhatian khusus kepada kepada anak migran, terutama yang tidak didampingi atau terpisahkan
- c) Mempermudah migran untuk berkomunikasi segera guna memberitahukan keluarganya bahwa mereka selamat dengan memfasilitasi akses ke sarana komunikasi di sepanjang jalur perjalanan dan tempat tujuan, termasuk di tempat penahanan, termasuk memberikan akses ke perwakilan konsuler, kewenangan lokal dan organisasi yang dapat memberikan bantuan untuk menghubungi keluarga, terutama dalam kasus anak migran yang tidak didampingi atau terpisahkan, demikian pula dengan remaja
- d) Membuka saluran koordinasi transnasional, termasuk melalui kerja sama konsuler, dan menentukan titik-titik kontak bagi yang hendak mencari migran anggota keluarganya yang hilang, dan melalui kontak itu keluarga dapat memperoleh kabar

tentang status pencarian dan informasi lain yang relevan, dengan tetap menghormati hak atas privasi dan melindungi data pribadi

e) Mengumpulkan, memusatkan dan mensistematisasi data jenazah dan memastikannya agar tetap dapat ditelusuri setelah pemakaman, sesuai standar forensik internasional yang berlaku, dan membangun saluran koordinasi di tingkat transnasional untuk membantu identifikasi dan memberikan informasi kepada keluarga

f) Mengupayakan semua cara, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk menemukan, mengidentifikasi, dan memulangkan jenazah migran ke negara asalnya, demi menghormati keinginan keluarga yang berduka, dan, pada kasus individu yang tidak dikenali, memfasilitasi upaya identifikasi dan penanganan sisa jenazah, untuk memastikan bahwa jasad migran yang meninggal diperlakukan secara bermartabat, terhormat dan tepat

TUJUAN 9: Memperkuat tanggapan transnasional terhadap penyelundupan migran

25. Kami berkomitmen untuk menggalakkan upaya bersama dalam mencegah dan melawan penyelundupan migran dengan memperkuat kapasitas dan kerjasama internasional untuk mencegah, menyelidiki, mengadili dan menghukum penyelundupan migran untuk mengakhiri impunitas jaringan penyelundupan. Kami lebih lanjut berkomitmen untuk memastikan bahwa para migran tidak akan dituntut untuk bertanggungjawab atas kejahatan berdasar fakta bahwa dirinya telah menjadi objek penyelundupan, meskipun ada kemungkinan penuntutan atas tindakan pelanggaran lainnya menurut hukum nasional. Kami juga berkomitmen untuk mengidentifikasi para migran yang diselundupkan untuk melindungi hak asasi manusianya, dengan mengindahkan kebutuhan khusus perempuan dan anak, dan akan membantu khususnya migran korban penyelundupan yang berada dalam situasi terancam, dengan tunduk pada hukum internasional.

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

- a) Mendorong ratifikasi, pengesahan dan pelaksanaan Protokol menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi PBB untuk menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC)
- b) Menggunakan mekanisme transnasional, regional dan bilateral untuk berbagi informasi dan intelijen yang relevan mengenai jalur penyelundupan, modus operandi dan transaksi keuangan dari jaringan penyelundupan, kerentanan yang dihadapi oleh migran yang diselundupkan, dan data lain untuk membongkar jaringan penyelundupan dan meningkatkan tanggapan bersama.
- c) Mengembangkan protokol kerjasama yang tanggap gender dan peka anak di sepanjang jalur migrasi yang menguraikan langkah demi langkah untuk mengidentifikasi dan membantu secara memadai migran yang diselundupkan, sesuai dengan hukum internasional, serta untuk memfasilitasi penegakan hukum dan kerjasama intelijen lintas batas untuk mencegah dan melawan penyelundupan migran dengan tujuan untuk mengakhiri impunitas para penyelundup dan mencegah migrasi tak-reguler, sambil memastikan bahwa tindakan melawan penyelundupan tersebut sepenuhnya menghormati hak asasi manusia
- d) Mengadopsi tindakan legislatif dan lainnya yang mungkin diperlukan agar penyelundupan migran ditetapkan sebagai tindakan kejahatan, apabila dilakukan secara sengaja, guna mengambil secara langsung dan tidak langsung keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya yang diperoleh penyelundup, termasuk untuk memperberat hukuman pada penyelundupan yang menempatkan migran dalam keadaan terancam, dengan mematuhi hukum internasional
- e) Merancang, meninjau atau mengubah kebijakan dan prosedur yang relevan untuk membedakan antara kejahatan penyelundupan migran dan perdagangan orang dengan menggunakan definisi yang tepat dan menerapkan perlakuan yang berbeda terhadap dua kejahatan terpisah ini, dengan mengakui bahwa migran yang diselundupkan mungkin juga menjadi korban perdagangan orang, yang oleh karena itu membutuhkan perlindungan dan bantuan yang tepat
- f) Mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyelundupan migran sepanjang daur migrasi dalam kemitraan dengan Negara-negara lain dan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk melakukan kerjasama di bidang pembangunan, informasi publik, peradilan, juga melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas teknis di tingkat nasional dan lokal, dengan perhatian khusus pada wilayah geografis tempat migrasi tak reguler secara sistematis bersumber

TUJUAN 10: Mencegah, memerangi dan memberantas perdagangan orang dalam konteks migrasi internasional

26. Kami berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah legislatif atau langkah lainnya untuk mencegah, memerangi dan memberantas perdagangan orang dalam konteks migrasi internasional dengan memperkuat kapasitas dan kerjasama internasional dalam menyelidiki, mengadili dan menghukum perdagangan orang, menekan permintaan yang mendorong eksploitasi yang mengarah ke perdagangan orang, dan mengakhiri impunitas jaringan perdagangan orang. Kami selanjutnya berkomitmen untuk meningkatkan identifikasi serta perlindungan, dan bantuan bagi migran yang menjadi korban perdagangan, dengan memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak.

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

- a) Mempromosikan, meratifikasi, mengesahkan dan melaksanakan Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia Terutama Perempuan dan Anak, melengkapi Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC)
- b) Mempromosikan penerapan Rencana Aksi Global untuk Memerangi Perdagangan Orang dan mempertimbangkan rekomendasi yang relevan dari Perangkat UNODC untuk Memerangi Perdagangan Orang dan dokumen UNODC terkait lainnya ketika mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan langkah-langkah di tingkat nasional dan regional yang berkaitan dengan perdagangan orang
- c) Memantau jalur migrasi tak-reguler yang dapat digunakan oleh jaringan perdagangan manusia untuk merekrut dan memperdaya migran yang diselundupkan atau migran tak-reguler, guna memperkuat kerjasama di tingkat bilateral, regional dan lintas wilayah untuk pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan para pelaku, serta identifikasi, perlindungan dan bantuan untuk korban perdagangan orang
- d) Membagi informasi dan intelijen yang relevan melalui mekanisme transnasional dan regional, termasuk informasi menyangkut modus operandi, model ekonomi dan kondisi yang mendorong jaringan perdagangan, memperkuat kerjasama antara semua aktor yang relevan, termasuk unit intelijen keuangan, badan pengawas keuangan dan

lembaga keuangan, untuk mengidentifikasi dan menghentikan aliran uang yang terkait dengan perdagangan orang, dan meningkatkan kerjasama peradilan dan penegakan dengan tujuan untuk memastikan adanya akuntabilitas dan untuk mengakhiri impunitas

e) Menerapkan langkah-langkah yang dialamatkan pada kerentanan khusus perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, terlepas dari status migrasi mereka, yang telah atau menghadapi risiko menjadi korban perdagangan orang dan bentuk eksploitasi lainnya dengan memfasilitasi akses ke keadilan dan pelaporan yang aman tanpa merasa takut akan penahanan, deportasi atau hukuman, dengan memusatkan perhatian pada pencegahan, identifikasi, perlindungan dan bantuan yang sesuai, dan penanganan bentuk-bentuk khusus dari kekerasan dan eksploitasi

f) Memastikan bahwa definisi perdagangan orang yang digunakan dalam undang-undang, kebijakan dan perencanaan migrasi, serta dalam penuntutan peradilan sesuai dengan hukum internasional, untuk membedakan antara kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan migran

g) Memperkuat legislasi dan prosedur yang relevan untuk meningkatkan penuntutan terhadap pelaku perdagangan orang, menghindarkan kriminalisasi terhadap migran korban untuk pelanggaran yang terkait perdagangan orang, dan memastikan bahwa korban menerima perlindungan dan bantuan yang layak, tanpa mensyaratkan kerjasama yang bersangkutan dengan pihak yang berwenang memerangi perdagangan manusia

h) Menyediakan perlindungan dan bantuan untuk migran korban perdagangan orang, seperti pemulihan fisik, psikologis dan sosial, dan langkah-langkah yang memungkinkan mereka dapat tetap berada di negara tujuan, sementara atau permanen, untuk kasus-kasus yang sesuai, memfasilitasi akses korban ke pengadilan, termasuk untuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi, sesuai dengan hukum internasional

i) Menciptakan sistem informasi nasional dan lokal dan program pelatihan yang menyiagakan dan mendidik warganegara, majikan, demikian pula pejabat publik dan petugas penegak hukum, dan kemampuan untuk mengenali tanda-tanda perdagangan orang, seperti anak yang dipekerjakan paksa dan kerja wajib, di negara asal, negara persinggahan, dan negara tujuan

j) Melakukan kampanye peningkatan kesadaran, dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan yang relevan, bagi para migran dan calon migran tentang risiko dan

bahaya perdagangan orang, dan memberi mereka informasi tentang cara mencegah dan melaporkan kegiatan perdagangan orang

TUJUAN 11: Mengelola perbatasan secara terpadu, aman dan terkoordinasi

27. Kami berkomitmen untuk mengelola perbatasan nasional kami secara terkoordinasi, mendorong kerjasama bilateral dan regional, memastikan keamanan bagi Negara-negara, kelompok masyarakat dan migran, dan memfasilitasi pergerakan orang lintas-batas yang aman dan reguler serta mencegah migrasi tak-reguler. Kita lebih lanjut berkomitmen untuk menerapkan kebijakan pengelolaan perbatasan yang menghormati kedaulatan nasional, supremasi hukum, kewajiban-kewajiban di bawah hukum internasional, hak asasi semua migran, terlepas dari status migrasi mereka, dan tidak diskriminatif, tanggap gender dan peka terhadap anak.

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

- a) Meningkatkan kerjasama pengelolaan perbatasan internasional, regional dan lintas regional, dengan mempertimbangkan situasi khusus negara-negara perlintasan, dengan identifikasi yang tepat, rujukan yang tepat waktu dan efisien, bantuan dan perlindungan yang sesuai bagi para migran dalam situasi kerentanan saat berada atau di dekat perbatasan internasional, dengan mematuhi hukum hak asasi manusia internasional, dengan mengadopsi pendekatan seluruh pemerintahan, melaksanakan pelatihan gabungan lintas batas, dan mendorong langkah-langkah untuk peningkatan kapasitas
- b) Membentuk struktur dan mekanisme yang tepat untuk pengelolaan perbatasan terintegrasi yang efektif dengan memastikan prosedur penyeberangan perbatasan yang menyeluruh dan efisien, termasuk melalui pemeriksaan awal terhadap orang yang datang, pelaporan sebelumnya dari maskapai pembawa/pengangkut penumpang, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dengan menjunjung prinsip non-diskriminasi, menghormati hak atas privasi dan melindungi data pribadi.
- c) Meninjau kembali dan menyempurnakan prosedur nasional yang relevan untuk pemeriksaan di perbatasan, pemeriksaan individual dan proses wawancara, untuk memastikan proses yang seksama di perbatasan internasional dan bahwa semua migran diperlakukan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional, termasuk

melalui kerjasama dengan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

d) Mengembangkan perjanjian kerjasama teknis yang memungkinkan Negara-negara untuk mengajukan permohonan dan menawarkan aset, peralatan dan bantuan teknis lainnya untuk memperkuat pengelolaan perbatasan, khususnya di bidang pencarian dan penyelamatan serta situasi darurat lainnya.

e) Memastikan bahwa yang berwenang dalam perlindungan anak segera diberitahu dan ditugaskan untuk berpartisipasi dalam prosedur untuk menentukan kepentingan terbaik anak seketika sesudah anak yang tidak didampingi atau terpisahkan melintasi perbatasan internasional, sesuai dengan hukum internasional, termasuk dengan melatih petugas perbatasan tentang hak-hak anak dan prosedur yang peka terhadap anak, seperti langkah-langkah untuk mencegah pemisahan dan menyatukan kembali keluarga ketika terjadi pemisahan keluarga

f) Meninjau kembali dan memperbaiki hukum dan peraturan yang relevan untuk melihat kesesuaian sanksi bagi orang yang masuk atau tinggal secara tak-reguler, untuk memastikan sanksi tersebut sepantasnya, adil, tidak diskriminatif, dan sepenuhnya konsisten dengan proses hukum dan kewajiban lain di bawah hukum internasional.

g) Meningkatkan kerjasama lintas batas di antara negara-negara tetangga dan negara-negara lainnya, berkaitan dengan perlakuan terhadap orang-orang yang menyeberang atau berusaha menyeberang perbatasan internasional, termasuk dengan mempertimbangkan rekomendasi yang relevan dari Prinsip dan Pedoman yang dianjurkan OHCHR tentang Hak Asasi Manusia di Perbatasan Internasional untuk melihat praktik-praktik terbaik.

TUJUAN 12: Meningkatkan derajat kepastian dan keterdugaan dalam prosedur migrasi dalam hal proses pemeriksaan, penilaian dan rujukan (migran) secara seksama

28. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kepastian hukum dan keterdugaan dari prosedur migrasi dengan mengembangkan dan memperkuat mekanisme yang efektif dan berlandaskan hak asasi manusia untuk pemeriksaan awal yang memadai dan tepat waktu serta pemeriksaan individual terhadap semua migran dengan tujuan untuk

mengidentifikasi dan memfasilitasi akses ke prosedur rujukan yang benar berdasarkan hukum internasional

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

a) Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas dari prosedur migrasi dengan mengumumkan persyaratan untuk datang, masuk, tinggal, bekerja, belajar atau melakukan kegiatan lain, dan menerapkan teknologi guna menyederhanakan prosedur permohonan agar Negara-negara dan migran terhindar dari penangguhan dan biaya yang tidak perlu

b) Mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan khusus di dalam dan antar wilayah di bidang hak asasi manusia dan seluk-beluk trauma bagi tenaga penanganan pertama dan petugas pemerintah, termasuk penegak hukum, petugas perbatasan, perwakilan konsuler dan lembaga peradilan untuk memudahkan dan membakukan identifikasi dan rujukan, serta pemberian bantuan dan konseling yang peka budaya, bagi korban perdagangan orang, migran dalam situasi rentan, termasuk anak-anak khususnya yang tidak didampingi atau terpisahkan, dan orang-orang yang terdampak oleh segala bentuk eksploitasi dan pelecehan terkait penyelundupan migran di bawah situasi yang mengancam

c) Menegakkan mekanisme rujukan yang tanggap gender dan peka terhadap anak, termasuk dengan memperbaiki tindakan pemeriksaan awal dan penilaian individu di perbatasan tempat-tempat ketibaan pertama, dengan menerapkan prosedur operasi baku yang dikembangkan dengan berkoordinasi dengan otoritas setempat, Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional, organisasi internasional, dan masyarakat sipil.

d) Memastikan bahwa anak migran segera diidentifikasi di tempat ketibaan pertama di negara persinggahan dan negara tujuan, dan, jika tidak didampingi atau terpisahkan, agar segera dirujuk ke petugas yang berwenang di bidang perlindungan anak dan layanan terkait lainnya serta menunjuk wali hukum yang kompeten dan tidak memihak, dengan melindungi keutuhan keluarga, dan siapa pun yang secara sah dianggap sebagai anak agar diperlakukan sebagaimana demikian, kecuali bila ditentukan lain, sesudah melalui penilaian usia secara multi-disiplin, independen dan peka terhadap anak

e) Memastikan bahwa, dalam konteks perpindahan orang karena paduan beragam sebab, informasi relevan tentang hak dan kewajiban berdasarkan hukum dan prosedur

nasional, termasuk persyaratan masuk dan tinggal, bentuk perlindungan yang tersedia, serta pilihan untuk kembali dan reintegrasi, agar diberikan dan dapat diakses dengan cara yang sesuai, tepat waktu dan efektif

TUJUAN 13: Hanya menggunakan penahanan migrasi sebagai pilihan terakhir dan mengupayakan cara lainnya

29. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap penahanan dalam konteks migrasi internasional mengikuti proses hukum, tidak sewenang-wenang; dilakukan berdasarkan hukum, kebutuhan, kewajaran dan penilaian orang per orang, dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin, tanpa memandang apakah penahanan terjadi pada saat kedatangan, singgah, atau dalam proses pemulangan, dan tanpa memperhatikan jenis tempat penahanan. Kami lebih lanjut berkomitmen untuk mendahulukan pilihan bukan penahanan, sejalan dengan hukum internasional, dan menggunakan pendekatan berlandaskan hak asasi manusia pada setiap penahanan migran, dan hanya menggunakan penahanan sebagai langkah terakhir

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

- a) Menggunakan mekanisme hak asasi manusia yang relevan dan sudah ada dalam meningkatkan pemantauan independen terhadap penahanan migran, guna memastikan bahwa penahanan merupakan langkah terakhir, bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi, dan bahwa Negara-negara mempromosikan, menerapkan dan memperluas pilihan selain penahanan, untuk mendahulukan tindakan bukan penahanan serta penanganan berbasis komunitas, terutama dalam kasus yang menyangkut keluarga dan anak-anak
- b) Mengkonsolidasikan suatu perpustakaan/penyimpanan komprehensif untuk menyebarluaskan praktik-praktik terbaik berbasis hak asasi manusia tentang pilihan selain penahanan dalam konteks migrasi internasional, termasuk memfasilitasi pertukaran berkala dan pengembangan inisiatif berdasarkan keberhasilan praktik di Negara-negara, antar Negara dan pemangku kepentingan yang relevan
- c) Meninjau ulang dan memperbaiki undang-undang, kebijakan dan praktik-praktik terkait penahanan imigrasi untuk memastikan bahwa penahanan migran tidak

dilakukan secara sewenang-wenang, bahwa penahanan diputuskan berdasarkan hukum, dilakukan sewajarnya, memiliki tujuan yang sah, melalui pertimbangan terhadap orang per orang, sepenuhnya patuh pada proses hukum dan prosedur perlindungan, dan bahwa penahanan imigrasi tidak digunakan sebagai alat penggentaran atau digunakan sebagai bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan terhadap migran, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional

d) Menyediakan akses ke keadilan bagi semua migran di negara persinggahan dan negara tujuan yang menerapkan atau mungkin menerapkan penahanan, termasuk memudahkan akses ke saran dan bantuan hukum yang cuma-cuma atau terjangkau oleh pembela hukum yang teruji dan independen, serta menyediakan akses informasi dan akses terhadap hak untuk peninjauan berkala atas perintah penahanan

e) Memastikan bahwa semua migran dalam tahanan diberitahu tentang alasan penahanan mereka, dalam bahasa yang mereka pahami, dan memudahkan mereka untuk menggunakan hak-haknya, termasuk untuk berkomunikasi dengan konsuler atau utusan diplomatik masing-masing tanpa penundaan, untuk menghubungi perwakilan hukum dan anggota keluarga, berdasarkan hukum internasional serta jaminan adanya proses hukum

f) Mengurangi dampak penahanan yang buruk dan yang berkemungkinan berdampak jangka panjang terhadap migran dengan menjamin agar penahanan sesuai ketentuan hukum dan sewajarnya, bahwa penahanan dilakukan sesingkat mungkin, dengan menjaga keutuhan fisik dan mental, sekurang-kurangnya menyediakan akses untuk makanan, perawatan kesehatan dasar, pedoman dan bantuan hukum, informasi dan komunikasi, serta jaminan akomodasi yang memadai, berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.

g) Memastikan bahwa semua pihak yang berwenang dari pemerintah dan pihak swasta yang menjalankan penahanan melakukan tugasnya sesuai dengan hak asasi manusia dan dilatih mengenai prinsip non-diskriminasi, tentang pencegahan penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang dalam konteks migrasi internasional, dan bertanggung jawab bila terjadi pelecehan atau pelanggaran hak asasi manusia

h) Melindungi dan menghormati hak dan kepentingan terbaik anak pada setiap waktu, tanpa memandang status migrasinya, dengan memastikan ketersediaan dan aksesibilitas berbagai pilihan yang layak selain dari penahanan, dengan

mendahulukan cara perawatan berbasis masyarakat, yang menjamin akses untuk pendidikan dan perawatan kesehatan, dan menghormati hak mereka atas kehidupan keluarga dan keutuhan keluarga, dan berupaya untuk mengakhiri praktik penahanan anak dalam konteks migrasi internasional.

TUJUAN 14: Meningkatkan perlindungan, bantuan, dan kerja sama konsuler pada seluruh daur migrasi

30. Kami berkomitmen untuk memperkuat perlindungan dan bantuan konsuler untuk warga negara kami masing-masing di luar negeri, serta kerjasama konsuler antara Negara untuk lebih melindungi hak dan kepentingan semua migran pada setiap saat, dan untuk menjalankan perwakilan konsuler dalam rangka meningkatkan interaksi antara migran dan pihak berwenang di negara asal, negara persinggahan, dan negara tujuan, berdasarkan hukum internasional

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

- a) Bekerjasama membangun kapasitas konsuler, melatih petugas konsuler, mempromosikan pengaturan-pengaturan yang menyediakan layanan konsuler secara kolektif bilamana masing-masing negara tertentu tidak memiliki kapasitas, termasuk melalui bantuan teknis, dan mengembangkan perjanjian bilateral atau regional pada berbagai aspek kerjasama konsuler
- b) Melibatkan petugas konsuler dan imigrasi yang relevan dalam forum global dan regional yang ada tentang migrasi untuk bertukar informasi dan praktik terbaik dalam penanganan persoalan-persoalan yang menjadi perhatian bersama menyangkut warganegara di luar negeri, dan memberikan sumbangan bagi pengembangan kebijakan imigrasi yang menyeluruh dan berlandaskan bukti
- c) Menandatangani perjanjian bilateral atau regional untuk bantuan konsuler dan perwakilan di tempat yang Negara-negara memiliki kepentingan untuk memperkuat layanan konsuler yang efektif terkait dengan migrasi, tetapi tidak memiliki perwakilan diplomatik atau konsuler
- d) Memperkuat kapasitas konsuler untuk mengidentifikasi, melindungi dan membantu warganegara kami di luar negeri yang dalam situasi rentan, termasuk korban pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia dan hak perburuhan, korban kejahatan,

korban perdagangan orang, migran subjek penyelundupan yang dalam situasi terancam, dan pekerja migran yang dieksploitasi dalam proses pengerahan, dengan memberikan pelatihan kepada petugas konsuler tentang penanganan yang berbasis hak asasi manusia, tanggap gender dan peka terhadap anak

e) Memberikan kesempatan kepada warganegara kami di luar negeri untuk melaporkan diri, bekerjasama dengan konsuler, kewenangan nasional dan lokal, serta organisasi migran yang relevan, sebagai sarana untuk memperoleh informasi, layanan dan bantuan bagi migran yang dalam situasi darurat dan memastikan aksesibilitas bagi migran terhadap informasi yang relevan dan tepat waktu, seperti menyediakan saluran telepon permintaan bantuan dan mengkonsolidasikan pangkalan data digital nasional, sambil menjunjung hak atas privasi dan melindungi data pribadi

f) Menyediakan bantuan konsuler kepada warganegara kami berupa saran-saran, termasuk saran tentang hukum dan kebiasaan setempat, untuk berhubungan dengan pihak yang berwenang, inklusi keuangan, mendirikan usaha, serta menerbitkan dokumentasi yang relevan, seperti dokumen perjalanan, dokumen identitas konsuler yang dapat memudahkan akses ke layanan, pertolongan dalam situasi darurat, pembukaan rekening bank, dan akses ke fasilitas remitansi

TUJUAN 15: Menyediakan akses terhadap layanan dasar bagi migran

31. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua migran, tanpa memandang status migrasi mereka, dapat menggunakan hak asasi manusia dengan secara aman mengakses layanan dasar. Kami lebih lanjut berkomitmen untuk memperkuat sistem penyediaan layanan migran yang inklusif, kendatipun warganegara dan migran reguler mungkin berhak atas penyediaan layanan yang lebih komprehensif, sambil memastikan bahwa setiap perlakuan berbeda harus didasarkan pada hukum, sewajarnya, untuk tujuan yang sah, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

a) Memberlakukan undang-undang dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa dalam pemberian layanan terhadap migran tidak ada diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau

pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, kelahiran, disabilitas atau alasan lainnya, terlepas dari kasusnya, dapat berlaku pembedaan dalam penyediaan layanan berdasarkan status migrasi

b) Menjamin bahwa kerjasama antara penyedia layanan dan kewenangan imigrasi tidak menambah kerentanan bagi imigran tak-reguler sehingga menyisihkan mereka dari akses yang aman terhadap layanan dasar atau secara tidak sah melanggar hak asasi atas privasi, kebebasan, dan keselamatan orang di tempat penyediaan layanan dasar

c) Mengadakan dan memperkuat titik-titik layanan yang holistik dan mudah diakses di tingkat lokal, yang inklusif imigran, dan menyediakan informasi relevan tentang layanan dasar yang tanggap gender dan disabilitas serta peka terhadap anak, dengan akses yang aman untuk menjangkaunya

d) Menunjuk atau mengamankan lembaga independen di tingkat nasional atau lokal, misalnya Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional, untuk menerima, menyelidiki dan memantau keluhan tentang migran yang secara sistematis ditolak atau dirintangi aksesnya terhadap layanan dasar, agar mereka mendapatkan penggantian, dan untuk mendorong adanya perubahan praktik

e) Meleburkan kebutuhan-kebutuhan kesehatan para migran ke dalam kebijakan dan rencana pemeliharaan kesehatan nasional dan lokal, seperti melalui peningkatan kapasitas penyediaan layanan, memudahkan akses yang terjangkau dan non-diskriminatif, mengurangi hambatan komunikasi, dan melatih pemberian layanan yang peka budaya kepada penyedia layanan kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental dari migran dan masyarakat luas, termasuk dengan mempertimbangkan rekomendasi yang relevan dari Kerangka Kerja Prioritas WHO dan Prinsip Panduan untuk Meningkatkan Kesehatan Pengungsi dan Migran

f) Memberikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata kepada anak-anak dan remaja migran, serta membuka akses pada kesempatan belajar seumur hidup, termasuk dengan memperkuat kapasitas dari sistem pendidikan, dan dengan memfasilitasi akses non-diskriminatif terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, program pendidikan non-formal untuk anak-anak yang tidak dapat mengakses sistem pendidikan formal, pelatihan di tempat kerja dan kejuruan, pendidikan teknis, dan pelatihan bahasa, serta dengan membina kemitraan dengan semua pemangku kepentingan yang dapat mendukung upaya ini

TUJUAN 16: Memberdayakan migran dan masyarakat untuk mewujudkan inklusi yang sepenuhnya dan kepaduan sosial

32. Kami berkomitmen untuk mendorong untuk masyarakat yang inklusif dan padu dengan memberdayakan para migran untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan mempromosikan keterlibatan timbal-balik antara komunitas penerima dan komunitas migran dalam pelaksanaan hak dan kewajiban mereka terhadap yang lain, termasuk kepatuhan terhadap hukum nasional dan penghormatan terhadap adat istiadat di negara tujuan. Kami lebih lanjut berkomitmen untuk memperkuat kesejahteraan semua anggota masyarakat dengan meminimalkan kesenjangan, menghindarkan pengkutuban dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan dan institusi yang terkait dengan migrasi, sejalan dengan kesadaran bahwa migran yang berintegrasi sepenuhnya memiliki posisi yang lebih baik untuk ikut memberi andil terhadap kesejahteraan.

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

- a) Mempromosikan rasa saling menghormati budaya, tradisi dan adat istiadat antara komunitas tempat tujuan dan migran melalui pertukaran dan penerapan praktik-praktik terbaik dalam kebijakan, program dan kegiatan integrasi, termasuk dengan mempromosikan cara-cara untuk menerima keberagaman dan mendorong kepaduan dan inklusi sosial
- b) Menyusun program-program pra-keberangkatan dan pasca-kedatangan yang komprehensif dan berdasarkan kebutuhan, dapat mencakup tentang hak dan kewajiban, pelatihan bahasa dasar, serta orientasi tentang norma sosial dan kebiasaan di negara tujuan
- c) Mengembangkan kebijakan nasional bertujuan jangka pendek, menengah dan panjang untuk membaurkan migran dalam masyarakat, melingkupi integrasi pasar tenaga kerja, penyatuan kembali keluarga, pendidikan, non-diskriminasi dan kesehatan, termasuk membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan yang relevan
- d) Mengupayakan pasar tenaga kerja yang inklusif dan partisipasi penuh pekerja migran dalam ekonomi formal dengan memfasilitasi akses pada kerja layak dan pada

lapangan kerja yang mereka paling mampu melakukannya, menyesuaikannya dengan permintaan dan pasokan keterampilan dalam pasar tenaga kerja lokal dan nasional

e) Memberdayakan perempuan migran dengan menghapuskan pembatasan diskriminatif berbasis gender pada pekerjaan formal, memastikan hak atas kebebasan berserikat, dan memudahkan akses ke layanan dasar yang relevan, sebagai langkah untuk mempromosikan kepemimpinan perempuan migran dan menjamin partisipasi mereka secara penuh, bebas dan setara dalam masyarakat dan di bidang ekonomi

f) Mendirikan pusat-pusat kegiatan atau program masyarakat di tingkat lokal untuk mendorong partisipasi migran dalam masyarakat negara penerima dengan melibatkan migran, anggota masyarakat, organisasi diaspora, perkumpulan migran, dan kewenangan lokal dalam dialog antarbudaya, berbagi cerita, program bimbingan, dan pengembangan hubungan usaha yang meningkatkan capaian dari integrasi dan menumbuhkan rasa saling menghormati.

g) Mendayagunakan keterampilan, kemampuan budaya dan kecakapan berbahasa yang dimiliki oleh migran dan komunitas negara penerima dengan mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan pertukaran pelatihan, serta kursus dan lokakarya tanggap gender bidang kejuruan dan keutuhan masyarakat

h) Mendukung kegiatan-kegiatan multikultural yakni olahraga, musik, seni, festival kuliner, kegiatan kerelawanan dan kegiatan sosial lainnya, yang akan mendorong saling pemahaman dan saling penghargaan antara budaya dari migran dan masyarakat di tempat tujuan

i) Mempromosikan lingkungan sekolah yang ramah dan aman, dan mendukung keinginan dari anak-anak migran dengan mendorong pergaulan dalam komunitas sekolah, memasukkan informasi yang berbasis bukti tentang migrasi ke dalam kurikulum pendidikan, dan mencurahkan sumberdaya tersendiri bagi sekolah-sekolah dengan konsentrasi anak-anak migran yang tinggi untuk kegiatan integrasi guna mendorong penghormatan terhadap keragaman dan inklusi, dan mencegah segala bentuk diskriminasi, termasuk rasisme, xenophobia dan intoleransi

TUJUAN 17: Menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan mendorong wacana publik yang berbasis bukti untuk membangun persepsi terhadap migrasi

33. Kami berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi, serta mengutuk dan menentang ungkapan, tindakan dan wujud dari rasisme, diskriminasi rasial, kekerasan, xenofobia dan segala intoleransi terkait terhadap semua migran, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. Kami lebih jauh berkomitmen untuk memajukan wacana publik yang terbuka dan berbasis bukti tentang migrasi dan migran, bermitra dengan seluruh bagian dari masyarakat, yang menghasilkan persepsi yang lebih realistis, manusiawi dan membangun menyangkut hal ini. Kami juga berkomitmen untuk melindungi kebebasan berekspresi sesuai dengan hukum internasional, menghargai bahwa debat yang terbuka dan bebas akan menyumbang pada pemahaman yang menyeluruh terhadap segenap aspek dari migrasi

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

- a) Memberlakukan, menerapkan atau mempertahankan undang-undang yang menghukum kejahatan kebencian dan kebencian dengan pengancaman terhadap migran, dan melatih penegak hukum dan pejabat publik lainnya untuk mengidentifikasi, mencegah dan menangani kejahatan tersebut dan tindakan kekerasan lainnya yang menyasar migran, serta menyediakan layanan medis, bantuan hukum dan psikososial untuk korban
- b) Memberdayakan migran dan komunitas untuk mengecam setiap hasutan untuk melakukan kekerasan terhadap migran dengan menyebarkan informasi tentang mekanisme yang tersedia untuk pemulihan, dan memastikan bahwa pelaku yang terlibat aktif melakukan kejahatan kebencian terhadap migran harus bertanggung jawab, sesuai dengan undang-undang nasional, sambil menjunjung hukum hak asasi manusia internasional, khususnya hak atas kebebasan berekspresi
- c) Mempromosikan pemberitaan media masa yang independen, obyektif dan bermutu, termasuk informasi berbasis internet, dengan meningkatkan kepekaan dan mendidik profesional media tentang persoalan dan peristilahan terkait migrasi, mengusahakan standar pemberitaan dan iklan yang etis, dan menghentikan alokasi dana publik atau bantuan material untuk media masa yang secara sistematis mempromosikan intoleransi, xenophobia, rasisme dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya terhadap migran, dengan tetap sepenuhnya menghormati kebebasan media
- d) Menegakkan mekanisme untuk mencegah, mengenali, dan menanggapi penggambaran rasial, etnis, dan agama oleh kewenangan publik, serta ungkapan

xenophobia, rasisme yang sistematis, dan segala bentuk diskriminasi berlapis dan beririsan lainnya, bermitra dengan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, termasuk dengan menelusuri dan menerbitkan analisis kecenderungan, serta memastikan akses ke mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif.

e) Menyediakan untuk para migran, terutama migran perempuan, akses ke mekanisme pengaduan nasional dan regional serta mekanisme ganti rugi dengan tujuan untuk mendorong akuntabilitas dan langkah penanganan dari pemerintah terhadap tindakan dan wujud diskriminasi yang menyasar migran dan keluarganya

f) Mempromosikan kampanye peningkatan kesadaran yang dialamatkan kepada komunitas di tempat asal, tempat persinggahan dan tujuan untuk memberikan pandangan publik mengenai peran positif dari migrasi yang aman, tertib, dan reguler, berdasarkan bukti dan fakta, untuk menghentikan rasisme, xenofobia dan stigmatisasi terhadap semua migran

g) Melibatkan migran, pemimpin politik, agama dan masyarakat, serta pendidik dan penyedia layanan untuk mendeteksi dan mencegah kejadian intoleransi, rasisme, xenofobia, dan bentuk diskriminasi lain terhadap migran dan diaspora dan mendukung kegiatan masyarakat lokal untuk mempromosikan rasa saling menghormati, termasuk dalam konteks kampanye pemilu

TUJUAN 18: Mengembangkan keterampilan dan memfasilitasi pengakuan timbal balik terhadap keterampilan, kualifikasi dan kompetensi

34. Kami berkomitmen untuk mencari pemecahan inovatif untuk mendorong adanya pengakuan timbal-balik terhadap keterampilan, kualifikasi, dan kompetensi dari pekerja migran di semua tingkat keterampilan, dan mempromosikan pengembangan keterampilan yang digerakkan oleh permintaan agar migran secara optimal dapat-dipekerjakan di pasar tenaga kerja formal di negara tujuan dan di negara asalnya pada saat mereka kembali, dengan memastikan kerja layak dalam migrasi tenaga kerja

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

a) Mengembangkan acuan dan pedoman untuk pengakuan timbal-balik terhadap kualifikasi yang diperoleh di luar negeri dan keterampilan yang diperoleh secara

non-formal di berbagai sektor melalui kerjasama dengan industri masing-masing dengan maksud untuk memastikan kesesuaiannya di seluruh dunia berdasarkan model dan praktik terbaik yang ada

b) Mendorong transparansi dalam sertifikasi dan menyesuaikan Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional dengan menyetujui kriteria standar, indikator dan parameter penilaian, dan dengan menyusun dan memperkuat perangkat penjabaran keterampilan nasional, pendaftaran atau kelembagaannya, dalam rangka melancarkan prosedur pengakuan timbal balik yang efektif dan efisien di semua tingkat pekerjaan

c) Menandatangani perjanjian bilateral, regional atau multilateral mengenai pengakuan timbal-balik, atau memasukkan ketentuan tersebut dalam perjanjian lainnya, misalnya perjanjian tentang lalu-lintas tenaga kerja atau perjanjian perdagangan, agar memudahkan dalam menyetarakan atau membandingkannya ke dalam sistem nasional, misalnya dengan pengakuan secara otomatis atau melalui mekanisme pengakuan timbal-balik yang diatur

d) Menggunakan teknologi dan digitalisasi agar evaluasi dan pengakuan keterampilan secara timbal-balik dapat dilakukan secara lebih menyeluruh berdasarkan kelulusan dari pendidikan formal juga berdasar kompetensi yang diperoleh secara non-formal serta berdasarkan pengalaman kerja, pada semua tingkat keterampilan

e) Membangun kemitraan keterampilan global di antara negara-negara, yang bertujuan memperkuat kapasitas pelatihan dari kewenangan nasional dan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk sektor swasta dan serikat buruh, dan mendorong pengembangan keterampilan untuk pekerja di negara asal dan migran di negara tujuan untuk membekali peserta pelatihan agar dapat terserap di pasar tenaga kerja di negara-negara yang berperan serta

f) Mempromosikan jaringan antar-kelembagaan dan kerjasama program dalam kemitraan antara sektor swasta dan lembaga pendidikan di negara asal dan negara tujuan agar memungkinkan peluang pengembangan keterampilan yang saling menguntungkan bagi migran, masyarakat dan mitra yang terlibat, termasuk dengan mengembangkan praktik terbaik Mekanisme Bisnis dalam konteks Forum Global untuk Migrasi dan Pembangunan

g) Terlibat dalam kemitraan dan program bilateral dalam kerjasama dengan pemangku kepentingan yang relevan, yang mendorong pengembangan, mobilitas dan sirkulasi keterampilan, seperti melalui program pertukaran pelajar, beasiswa, program pertukaran profesional dan pelatihan atau magang, yang memberikan pilihan-pilihan

bagi penerima manfaat program, sesudah menempuh program tersebut, dalam mendapatkan pekerjaan dan berwirausaha

h) Bekerjasama dengan sektor swasta dan majikan menyelenggarakan program pengembangan dan pencocokan keterampilan jarak jauh atau dalam jaringan (*online*) yang mudah diakses dan tanggap-gender untuk migran dari semua tingkat keterampilan, termasuk pelatihan pengantar bahasa dan pelatihan bahasa yang berkaitan dengan pekerjaan, pelatihan kerja, serta menjembatani ke program pelatihan lanjutan, agar migran lebih dapat-dipekerjakan di sektor yang membutuhkan tenaga kerja, berdasar pengetahuan pada masing-masing industri tentang dinamika pasar tenaga kerja, khususnya untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan

i) Meningkatkan kemampuan buruh migran untuk beralih pekerjaan atau berpindah majikan dengan menyediakan dokumentasi yang memberikan pengakuan tentang keterampilan yang diperolehnya dari pengalaman bekerja atau dari mengikuti pelatihan, untuk mengoptimalkan manfaat dari peningkatan keterampilan

j) Mengembangkan dan mempromosikan cara-cara inovatif untuk adanya pengakuan dan penilaian timbal-balik secara formal dan informal terhadap keterampilan yang diperoleh, termasuk melalui pelatihan untuk pencari kerja yang diberikan saat dibutuhkan dan yang bersifat melengkapi, melalui pembimbingan, dan program magang, agar ada pengakuan penuh terhadap kecakapan yang diperoleh sebelumnya, serta dengan penerbitan sertifikat kemahiran untuk mengesahkan bahwa telah diperolehnya keterampilan yang baru

k) Membuat suatu mekanisme penyaringan terhadap kemampuan dan memberikan informasi kepada para migran tentang cara yang diperlukan agar keterampilan dan kualifikasi yang mereka miliki dapat dinilai dan diakui sebelum pemberangkatan, termasuk dalam proses pengerahan atau pada tahap awal setelah kedatangan, agar mereka lebih dapat-dipekerjakan

l) Bekerjasama mempromosikan perangkat dokumentasi dan informasi, bermitra dengan pemangku kepentingan yang relevan, yang mencantumkan keterangan tentang kebiasaan, keterampilan, dan kualifikasi dari buruh, yang diakui di negara asal, negara persinggahan, dan negara tujuan, sehingga memungkinkan majikan dapat menilai kesesuaian dari buruh migran yang bersangkutan dalam proses lamaran kerja

TUJUAN 19: Menciptakan kondisi agar migran dan diaspora dapat berkontribusi penuh terhadap pembangunan berkelanjutan di semua negara

35. Kami berkomitmen untuk memberdayakan migran dan diaspora untuk untuk mengembangkan andil pembangunan mereka, dan mengambil manfaat dari migrasi untuk pembangunan berkelanjutan, untuk menegaskan kembali bahwa migrasi merupakan kenyataan multidimensional yang khususnya relevan bagi pembangunan berkelanjutan di negara asal, negara persinggahan, dan negara tujuan

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

- a) Memastikan pelaksanaan yang sepenuhnya dan efektif dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Agenda Aksi Addis Ababa, dengan memperkuat dan melancarkan dampak positif dari migrasi untuk mewujudkan seluruh Sasaran Pembangunan Berkelanjutan
- b) Mengintegrasikan migrasi ke dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan sektoral di tingkat lokal, nasional, regional dan global, dengan mempertimbangkan pedoman dan rekomendasi kebijakan terkait yang relevan, seperti Buku Pegangan GMG tentang Pengarusutamaan Migrasi ke dalam Perencanaan Pembangunan, untuk menajamkan dan membuat efektif kebijakan-kebijakan kerjasama pembangunan
- c) Melakukan penelitian tentang dampak dari sumbangan bukan-uang dari migran dan diaspora terhadap pembangunan berkelanjutan di negara asal dan negara tujuan; misalnya terhadap alih pengetahuan dan keterampilan, keterlibatan di lapangan sosial dan sipil, dan pertukaran budaya, dengan tujuan untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti dan memperkuat diskusi kebijakan global
- d) Memfasilitasi sumbangan para migran dan diaspora bagi negara asalnya, termasuk dengan membangun atau memperkuat struktur atau mekanisme dalam pemerintah di semua tingkatan, seperti membentuk kantor atau titik-informasi, dewan penasihat pemerintah untuk urusan diaspora, agar potensi migran dan diaspora diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan tentang migrasi dan pembangunan, serta membentuk titik-informasi khusus diaspora di perwakilan diplomatik dan konsulat
- e) Mengembangkan program dukungan terarah dan produk finansial, untuk mendukung investasi dan kewirausahaan dari migran dan diaspora, termasuk dengan memberikan dukungan administratif dan hukum untuk memulai usaha, pemberian modal awal, membentuk saham diaspora dan dana pembangunan diaspora, dan menyelenggarakan pameran dagang khusus

- f) Menyediakan informasi dan panduan yang mudah diakses, termasuk melalui platform digital, serta menyediakan suatu mekanisme yang disesuaikan, agar secara terkoordinasi dan efektif, sehingga migran dan diaspora dapat terlibat dalam kegiatan kerelawanan dan kedermawanan, khususnya untuk keadaan darurat kemanusiaan di negara asal mereka, termasuk dengan melibatkan perwakilan konsuler
- g) Memungkinkan partisipasi dan keterlibatan para migran dalam politik di negara asal mereka, termasuk pada proses perdamaian dan rekonsiliasi, dalam pemilu dan reformasi politik, misalnya dengan menyusun daftar pemilih untuk warganegara di luar negeri, melalui keterwakilan dalam dewan perwakilan rakyat, disesuaikan dengan undang-undang nasionalnya
- h) Mendorong kebijakan migrasi yang mengoptimalkan manfaat dari diaspora bagi negara asal dan negara tujuan serta komunitasnya, dengan menyediakan kemudahan untuk bepergian, bekerja dan berinvestasi dengan beban administrasi serendah-rendahnya, termasuk dengan meninjau dan secara selayaknya memperbaiki peraturan mengenai visa, ijin tinggal, dan kewarganegaraan
- i) Bekerja sama dengan negara lain, sektor swasta dan organisasi pengusaha, mengupayakan agar migran dan diaspora, terutama mereka yang berasal dari bidang sangat teknis dan yang banyak diminati, untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya dan terlibat dalam kegiatan alih-pengetahuan di negara asalnya sendiri, tanpa mereka harus mengalami kehilangan status tinggal atau manfaat sosial
- j) Membangun kemitraan di antara pemerintah lokal, komunitas lokal, sektor swasta, diaspora, organisasi daerah seasal dan organisasi migran untuk melakukan alih pengetahuan dan keterampilan antar negara asal dan negara tujuan, termasuk dengan memetakan para diaspora beserta keterampilannya, sebagai sarana untuk mempertahankan ikatan diaspora dan negara asalnya

TUJUAN 20: Mendorong pengiriman remitansi yang lebih cepat, aman dan murah serta mendukung inklusi keuangan bagi migran

36. Kami berkomitmen untuk mendorong pengiriman remitansi yang lebih cepat, aman, dan murah dengan terus mengembangkan kebijakan dan peraturan yang mendorong persaingan, regulasi dan inovasi dalam pasar remitansi serta dengan menyediakan program dan instrumen tanggap-gender yang meningkatkan inklusi keuangan dari migran dan keluarganya. Kami lebih lanjut berkomitmen untuk

mengoptimalkan dampak perubahan dari remitansi bagi kesejahteraan buruh migran dan keluarganya, serta terhadap pembangunan berkelanjutan di Negara-negara, serta dengan menghargai bahwa remitansi merupakan sumber modal swasta yang penting, dan tidak dapat disamakan dengan aliran keuangan internasional lainnya, seperti investasi luar negeri langsung, bantuan pembangunan resmi, atau sumber pembiayaan pembangunan dari dana publik lainnya

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

- a) Menyusun suatu peta jalan untuk menekan biaya transaksi remitansi migran menjadi kurang dari 3 persen dan menghapus jalur pengiriman uang dengan biaya yang lebih tinggi dari 5 persen pada tahun 2030 sejalan dengan target ke 10.c dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030
- b) Mempromosikan dan mendukung Hari Internasional Remitansi Keluarga PBB dan Forum Global IFAD mengenai Remitansi, Investasi, dan Pembangunan sebagai landasan penting untuk membangun dan memperkuat kemitraan untuk menemukan pemecahan yang inovatif dalam pengiriman remitansi yang lebih murah, cepat, dan aman, bersama semua pemangku kepentingan yang relevan
- c) Menyelaraskan peraturan-peraturan pasar remitansi dan mengupayakan tersedianya infrastruktur remitansi yang lebih dapat bekerja antar-operasi di sepanjang jalur migrasi, dengan memastikan bahwa langkah-langkah untuk memerangi aliran keuangan ilegal dan pencucian uang tidak membuat alir remitansi migran terhambat oleh kebijakan yang tidak semestinya, berlebihan atau diskriminatif.
- d) Menegakkan kerangka kebijakan dan peraturan yang membantu mempromosikan pasar remitansi yang bersaing dan inovatif, menghilangkan hambatan yang tidak perlu pada penyedia layanan remitansi bukan-bank dalam mengakses infrastruktur sistem pembayaran, pengampunan pajak atau pemberian insentif pada pengiriman remitansi, membuka akses pasar bagi beragam penyedia layanan, pemberian insentif bagi sektor swasta untuk memperbesar layanan remitansi, meningkatkan keamanan dan keterdugaan dari transaksi bernilai rendah, dengan mempertimbangkan masalah yang timbul akibat pengabaian risiko tersebut, serta mengembangkan metodologi untuk membedakan pengiriman remitansi dari aliran uang yang dilarang, dengan berkonsultasi dengan penyedia layanan remitansi dan regulator keuangan

- e) Mengembangkan teknologi inovatif yang memudahkan pengiriman remitansi, seperti pengiriman melalui telepon mobil, pengiriman digital atau perbankan elektronik, untuk menekan biaya, mempercepat pengiriman, meningkatkan keamanannya, mempercepat pengiriman melalui jalur biasa, dan membuka saluran distribusi yang tanggap-gender bagi masyarakat yang kurang terlayani, termasuk untuk masyarakat di pedesaan, masyarakat dengan tingkat melek huruf yang rendah, dan penyandang disabilitas
- f) Menyediakan informasi yang mudah diakses tentang biaya pengiriman remitansi melalui penyedia dan saluran layanan, seperti menyajikan perbandingannya di situs web, untuk meningkatkan transparansi dan persaingan dalam pasar pengiriman remitansi, dan mempromosikan literasi keuangan dan inklusi migran dan keluarganya melalui pendidikan pelatihan
- g) Mengembangkan program dan instrumen untuk mempromosikan investasi dari pengirim remitansi dalam pembangunan dan kewirausahaan lokal di negara-negara asal, seperti melalui mekanisme hibah-terpilih, obligasi daerah dan kemitraan dengan organisasi daerah seasal, untuk meningkatkan potensi transformatif dari remitansi melampaui rumah tangga dari individu buruh migran
- g) Memudahkan perempuan migran untuk mengakses pelatihan literasi keuangan dan sistem pengiriman remitansi resmi, serta untuk membuka rekening bank, memiliki dan mengelola aset keuangan, investasi dan bisnis sebagai sarana untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam ekonomi.
- h) Menyediakan akses dan mengembangkan cara pemecahan perbankan dan melalui penggunaan instrumen keuangan bagi migran, termasuk bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dengan perempuan sebagai kepala keluarga, seperti membuka rekening bank yang memungkinkan pengiriman uang langsung dari majikan, rekening tabungan, pinjaman dan kredit, bekerjasama dengan sektor perbankan

TUJUAN 21: Bekerja sama dalam memfasilitasi proses pemulangan dan penerimaan kembali yang aman dan bermartabat, serta reintegrasi berkelanjutan

37. Kami berkomitmen untuk memfasilitasi dan bekerjasama untuk pemulangan yang aman dan bermartabat dan untuk menjamin proses hukum, penilaian orang per orang

dan upaya pemulihan yang efektif, dengan menegakkan larangan melakukan pengusiran kolektif, dan memulangkan migran ketika timbul risiko yang nyata dan dapat diduga akan ancaman kematian, penyiksaan, serta perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan, atau ancaman lain yang tidak dapat dipulihkan, sesuai kewajiban kami di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Kami lebih lanjut berkomitmen untuk memastikan bahwa warga negara kami sepatutnya diterima dan diijinkan kembali masuk, dengan sepenuhnya menghormati hak asasi untuk kembali ke negara sendiri serta kewajiban Negara-negara untuk menerima warganegaraanya sendiri. Kami berkomitmen pula untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk melindungi keamanan pribadi, pemberdayaan ekonomi, inklusi dan kepaduan sosial masyarakat, untuk memastikan bahwa integrasi kembali migran setelah kepulangannya berlangsung secara berkesinambungan

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

- a) Mengembangkan dan menjalankan kerangka kerja dan perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral, termasuk perjanjian penerimaan kembali, memastikan bahwa pengembalian dan penerimaan kembali migran ke negaranya sendiri berjalan aman, bermartabat dan sepenuhnya sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional, termasuk patuh pada hak-hak anak, dengan menerapkan prosedur yang jelas dan disepakati bersama yang menjunjung kerangka penjaminan prosedural, menjamin berlakunya penilaian orang per orang dan kepastian hukum, dan dengan memastikan bahwa seluruh prosedur ini memasukkan ketentuan yang membantu reintegrasi berkelanjutan
- b) Mempromosikan program kepulangan dan reintegrasi yang tanggap-gender dan peka terhadap anak, yang dapat menyertakan dukungan hukum, sosial dan keuangan, kemudian menjamin bahwa dalam konteks program yang bersifat sukarela ini seluruh kepulangan berlangsung melalui persetujuan yang diberikan sebelumnya secara bebas, dan bahwa migran yang kembali mendapatkan pendampingan untuk integrasi kembali melalui kemitraan yang efektif, termasuk menghindari mereka menjadi terlantar di negara asalnya setelah kembali
- c) Bekerjasama dalam melakukan identifikasi warganegara dan penerbitan dokumen perjalanan untuk pemulangan dan tiba kembali dengan aman dan bermartabat pada

kasus orang-orang yang tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di wilayah Negara lain, dengan mengembangkan cara yang terandalkan dan efisien untuk mengidentifikasi warganegara sendiri, misalnya dengan menambahkan pengenalan biometrik dalam pencatatan kependudukan, dan dengan digitalisasi sistem pencatatan sipil, yang sepenuhnya menghormati hak atas privasi dan perlindungan data pribadi

d) Membina hubungan kelembagaan antara kewenangan konsuler dan pejabat terkait dari negara asal dan negara tujuan, dan memberikan bantuan konsuler yang memadai kepada para migran sebelum kepulangannya dengan memudahkan akses ke dokumentasi, dokumen perjalanan, dan layanan lainnya, untuk memastikan keterdugaan, keselamatan dan martabat dari migran saat kepulangan dan ketibaannya kembali

e) Memastikan bahwa migran yang tidak memiliki hak untuk berada di wilayah Negara lain dapat kembali dengan aman dan bermartabat, dengan menjalani penilaian orang per orang, dilakukan oleh petugas berwenang yang kompeten melalui kerjasama yang sigap dan efektif antara negara asal dan negara tujuan, yang membolehkan semua upaya hukum yang berlaku dapat digunakan, sesuai dengan jaminan proses hukum, dan kewajiban lain di bawah hukum hak asasi manusia internasional

f) Membangun atau memperkuat mekanisme pemantauan nasional terhadap pemulangan, bermitra dengan pemangku kepentingan yang relevan, yang memberikan rekomendasi independen tentang cara dan sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, untuk menjamin keselamatan, martabat, dan hak asasi manusia dari semua migran yang dipulangkan

g) Memastikan bahwa proses pemulangan dan ketibaan kembali yang melibatkan anak-anak hanya dilakukan setelah kepentingan terbaik anak dipastikan, dengan mempertimbangkan hak atas kehidupan keluarga, keutuhan keluarga, dan bahwa ada orangtua, wali sah atau pejabat khusus yang menyertai anak bersangkutan selama proses pemulangan, untuk memastikan bahwa penerimaan, perawatan dan integrasi kembali dilakukan secara seksama di negara asal setelah kepulangan

h) Memfasilitasi integrasi kembali yang berkesinambungan untuk migran yang kembali ke kehidupan masyarakat dengan memberi mereka akses yang sama terhadap perlindungan dan layanan sosial, akses keadilan, bantuan psiko-sosial, pelatihan kerja, kesempatan kerja dan kerja layak, pengakuan atas keterampilan yang diperoleh di luar negeri, dan layanan keuangan, untuk dapat sepenuhnya mengembangkan

kewirausahaan, keterampilan, dan dayanya sebagai manusia, selaku anggota aktif masyarakat dan penyumbang andil bagi pembangunan berkelanjutan setelah kembali ke negara asalnya

i) Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tempat kepulangan migran, dengan memasukkan pertimbangan tersebut ke dalam strategi pembangunan nasional dan lokal, perencanaan infrastruktur, alokasi anggaran dan kebijakan lain yang relevan serta bekerjasama dengan otoritas lokal dan pemangku kepentingan yang relevan

TUJUAN 22: Membangun mekanisme agar hak atas jaminan sosial dan manfaat sosial dapat dipindahkan antar negara

38. Kami berkomitmen untuk membantu buruh migran di semua tingkat keterampilan agar memiliki akses ke perlindungan sosial di negara tujuan, serta diuntungkan dengan dapat dipindahkannya hak atas perlindungan sosial yang berlaku dan manfaat sosial yang diperoleh (*earned benefit*) di negara asal ke negara tujuan, ketika migran memutuskan untuk berpindah pekerjaan di negara lain.

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

a) Membangun atau mempertahankan sistem perlindungan sosial nasional yang tidak diskriminatif, termasuk perlindungan sosial minimum untuk warganegara dan migran, sejalan dengan Rekomendasi 202 ILO tentang Perlindungan Sosial.

b) Menandatangani perjanjian perlindungan sosial timbal-balik secara bilateral, regional atau multilateral untuk dapat-dipindahkannya manfaat yang didapat oleh buruh migran dari semua tingkat pekerjaan, yang merujuk pada perlindungan sosial minimum yang berlaku di masing-masing negara, hak dan ketentuan jaminan sosial yang berlaku, seperti pensiun, perawatan kesehatan atau manfaat lain yang diperoleh, atau dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam perjanjian terkait lain, misalnya dalam perjanjian migrasi tenaga kerja jangka panjang dan sementara

c) Mengintegrasikan ketentuan tentang dapat-dipindahkannya hak-hak dan manfaat yang diperoleh ke dalam kerangka jaminan sosial nasional, menunjuk petugas di negara asal, negara persinggahan, dan negara tujuan yang melayani permintaan dari

migran untuk pemindahan tersebut, mengatasi kesulitan yang dihadapi perempuan dan orang tua dalam mengakses perlindungan sosial, dan membuat instrumen khusus, seperti dana kesejahteraan migran di negara-negara asal yang menyokong pekerja migran dan keluarganya

TUJUAN 23: Memperkuat kerja sama internasional dan kemitraan global untuk migrasi yang aman, tertib, dan reguler

39. Kami berkomitmen untuk saling mendukung dalam mewujudkan tujuan dan komitmen yang tertuang dalam Global Compact ini dengan meningkatkan kerja sama internasional, menyegarkan kembali kemitraan global, dan semangat solidaritas, mengingat kembali pentingnya pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung migrasi yang aman, tertib, dan reguler dan dengan menyadari bahwa kita semua merupakan negara asal, negara persinggahan, dan negara tujuan. Lebih lanjut kami berkomitmen untuk bertindak bersama mengatasi tantangan yang dihadapi masing-masing negara dalam menerapkan Global Compact ini, dengan menggarisbawahi tantangan khusus yang dihadapi khususnya oleh negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang yang terkurung daratan, negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang, dan negara-negara berpenghasilan menengah. Kami juga berkomitmen untuk mendorong hubungan saling menguatkan antara Global Compact ini dan kerangka kerja hukum dan kebijakan internasional yang sudah ada, dengan menyelaraskan pelaksanaan Global Compact ini dengan kerangka kerja lainnya, khususnya Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 serta Agenda Aksi Addis Ababa, dan memperhatikan pernyataan dalam kerangka kerja tersebut bahwa migrasi dan pembangunan berkelanjutan bersifat multidimensional dan saling bergantung

Untuk mewujudkan komitmen ini, kami akan menempuh tindakan-tindakan berikut:

a) Mendukung Negara-negara seraya bersama-sama melaksanakan Global Compact, termasuk melalui penyediaan bantuan keuangan dan teknis, sesuai dengan prioritas, rencana kebijakan, dan strategi masing-masing negara, melalui pendekatan seluruh pemerintahan dan seluruh masyarakat

b) Meningkatkan kerjasama internasional dan regional untuk mempercepat pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 di wilayah geografis tempat migrasi tak-reguler secara sistematis bersumber, menimbang dampak konsisten yang disebabkan oleh kemiskinan, pengangguran, perubahan iklim dan bencana, ketidaksetaraan, korupsi, tata kelola yang buruk, dan faktor struktural lainnya, melalui kerangka kerjasama yang tepat, kemitraan inovatif dan keterlibatan semua pemangku kepentingan yang relevan, serta menjunjung tinggi kedaulatan nasional dan tanggung jawab bersama

c) Melibatkan dan mendukung kewenangan lokal dalam mengidentifikasi kebutuhan dan peluang kerjasama internasional untuk menjalankan Global Compact serta menyerap perspektif dan prioritas mereka dalam strategi pembangunan, program dan perencanaan migrasi, sebagai sarana untuk memastikan tata kelola yang baik serta menyelaraskan kebijakan antar pemerintah dan lintas kebijakan sektor, dan memaksimalkan efektifitas dan dampak dari kerjasama pembangunan internasional

d) Memanfaatkan mekanisme pengembangan kapasitas dan menyusun dari instrumen lain yang ada untuk memperkuat kapasitas dari kewenangan yang relevan dengan menggerakkan sumberdaya teknis, keuangan, dan manusia dari lembaga keuangan internasional Negara-negara, sektor swasta, organisasi internasional dan sumber lainnya untuk membantu semua Negara dalam memenuhi komitmen yang diuraikan dalam Global Compact ini

e) Menandatangani kemitraan bilateral, regional atau multilateral saling menguntungkan, dengan kemitraan yang sesuai dan transparan, sejalan dengan hukum internasional, untuk mengembangkan pemecahan terpilih terhadap persoalan kebijakan migrasi yang menyangkut kepentingan bersama dan memanfaatkan peluang dan tantangan migrasi sesuai dengan Global Compact

PELAKSANAAN

40. Untuk pelaksanaan yang efektif dari Global Compact, diperlukan upaya bersama di tingkat global, regional, nasional dan lokal, termasuk dari sistem PBB

41. Kami berkomitmen untuk memenuhi tujuan dan komitmen yang tertera dalam Global Compact, sejalan dengan visi dan prinsip-prinsip panduan kami, dengan

menempuh langkah-langkah efektif di semua tingkatan untuk memfasilitasi migrasi yang aman, tertib dan reguler di semua tahap. Kami akan menerapkan Global Compact, di negara-negara kami sendiri dan di tingkat regional dan global, dengan mempertimbangkan keragaman kenyataan di tingkat nasional, kapasitas, dan tingkat pembangunan, serta dengan menghormati kebijakan dan prioritas nasional. Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap hukum internasional dan menekankan bahwa Global Compact akan dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan hak dan kewajiban kami di bawah hukum internasional

42. Kami akan menerapkan Global Compact melalui peningkatan kerjasama bilateral, regional dan multilateral dan kemitraan global yang dibangkitkan kembali dalam semangat solidaritas. Kami akan terus membangun melalui mekanisme, platform, dan kerangka kerja yang ada untuk mengatasi persoalan migrasi dalam segenap dimensinya. Menyadari pentingnya kerjasama internasional untuk secara efektif mencapai tujuan dan komitmen di atas, kami akan berupaya untuk memperkuat keterlibatan kami dalam kerjasama dan bantuan Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama segitiga (negara-negara, negara donor, organisasi multilateral). Upaya kerjasama tersebut dalam hal ini akan diselaraskan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Agenda Aksi Addis Ababa

43. Kami memutuskan untuk membangun suatu mekanisme pengembangan kapasitas di dalam PBB, berdasarkan inisiatif yang ada, yang mendukung upaya Negara-negara Anggota untuk menerapkan Global Compact. Dimungkinkan bagi Negara Anggota, PBB dan pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk sektor swasta dan lembaga donor, untuk secara sukarela memberikan sumbangan teknis, keuangan dan sumberdaya manusia untuk memperkuat kapasitas dan mendorong kerjasama multi-mitra. Mekanisme pembangunan kapasitas tersebut mencakup:

- a) Pusat koneksi yang membantu merumuskan solusi yang digerakkan oleh permintaan dan disesuaikan dengan keadaan, dengan cara:
 - i. mempelajari dan menerima permintaan untuk mengembangkan suatu solusi
 - ii. mengidentifikasi mitra pelaksana utama di dalam dan di luar sistem PBB, sesuai dengan keunggulan komparatif dan kapasitas operasional mitra

iii. menghubungkan permintaan akan inisiatif dan solusi yang serupa untuk pertukaran antar-anggota dan menjajaki kemungkinan untuk mencontohnya, jika memungkinkan dan relevan

iv. memastikan pengaturan yang efektif untuk suatu pelaksanaan banyak-pihak dan banyak-pemangku kepentingan

v. mengidentifikasi peluang pendanaan, termasuk dengan memulai dana rintisan

b) Dana rintisan pembiayaan awal untuk mewujudkan suatu solusi berorientasi proyek, dengan cara:

i. menyediakan dana awal, jika diperlukan, untuk memulai proyek tertentu

ii. Mengupayakan sumber dana pelengkap

iii. menerima sumbangan keuangan sukarela dari Negara-negara Anggota, PBB, lembaga keuangan internasional, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta dan lembaga amal

c) Platform pengetahuan global berupa pangkalan data dalam jaringan (*online*), yang:

i. Menjalankan layanan penyimpanan bukti, praktik, dan inisiatif-inisiatif yang sudah ada

ii. Menyediakan kemudahan akses ke pengetahuan dan untuk berbagi solusi

iii. Membangun platform GFMD Platform untuk Kemitraan dan sumber lain yang relevan

44. Kami akan menerapkan Global Compact ini dengan bekerjasama dan bermitra dengan migran, masyarakat sipil, organisasi migran dan diaspora, organisasi berbasis agama, kewenangan dan masyarakat lokal, sektor swasta, serikat buruh, anggota parlemen, Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional, Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah, akademisi, media dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

45. Kami menyambut baik keputusan Sekretaris Jenderal untuk membentuk jaringan PBB untuk migrasi guna memastikan dukungan sistem yang efektif dan koheren untuk pelaksanaan, termasuk mekanisme pengembangan kapasitas, tindak lanjut dan peninjauan Global Compact, dalam menjawab kebutuhan Negara Anggota. Dalam hal ini, kami mencatatkan bahwa:

a) IOM akan berfungsi sebagai koordinator dan sekretariat jaringan

- b) jaringan akan sepenuhnya didukung oleh keahlian teknis dan pengalaman dari entitas yang relevan dalam sistem PBB
- c) berjalannya pekerjaan jaringan akan sepenuhnya selaras dengan mekanisme koordinasi yang ada dan reposisi Sistem Pembangunan PBB

46. Kami meminta Sekretaris Jenderal, dengan menggunakan jaringan dimaksud, untuk melaporkan ke Sidang Umum sekali setiap dua tahun tentang pelaksanaan Global Compact, kegiatan dari sistem PBB yang terkait, serta tentang berjalannya pengaturan kelembagaan

47. Menyadari peran penting dari proses dan platform yang dipimpin negara di tingkat global dan regional dalam memajukan dialog internasional tentang migrasi, kami mengundang Forum Global tentang Migrasi dan Pembangunan, Proses Konsultatif Regional dan forum global, regional dan subregional lainnya untuk menyediakan platform untuk bertukar pengalaman tentang implementasi Global Compact, berbagi praktik yang baik tentang kebijakan dan kerjasama, mempromosikan pendekatan inovatif, dan mendorong kemitraan multi-pemangku kepentingan mengenai kebijakan-kebijakan khusus

TINDAK LANJUT DAN PENINJAUAN

48. Kami akan meninjau kemajuan yang dicapai di tingkat lokal, nasional, regional dan global dalam menerapkan Global Compact dalam kerangka kerja PBB melalui pendekatan yang dipimpin Negara dan dengan partisipasi dari semua pemangku kepentingan yang relevan. Menyangkut tindak lanjut dan peninjauan, kami mengikuti langkah-langkah antar-pemerintah yang akan membantu kami memenuhi tujuan dan komitmen kami

49. Mempertimbangkan bahwa migrasi internasional memerlukan suatu forum di tingkat global yang memungkinkan Negara Anggota dapat meninjau kemajuan pelaksanaan dan memandu arah kerja PBB, kami memutuskan bahwa:

- a) Dialog Tingkat Tinggi tentang Migrasi Internasional dan Pembangunan, yang saat ini dijadwalkan berlangsung setiap sidang keempat Majelis Umum, akan diubah

tujuannya dan berganti nama menjadi menjadi “Forum Tinjauan Migrasi Internasional”

b) Forum Tinjauan Migrasi Internasional akan berfungsi sebagai platform global antar pemerintah utama bagi Negara-negara Anggota untuk membahas dan berbagi kemajuan dalam pelaksanaan seluruh aspek Global Compact, termasuk yang berkaitan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, dan dengan partisipasi semua pemangku kepentingan yang relevan

c) Forum Tinjauan Migrasi Internasional akan diadakan setiap empat tahun mulai tahun 2022

d) Forum Tinjauan Migrasi Internasional akan membahas pelaksanaan Global Compact di tingkat lokal, nasional, regional dan global, serta memungkinkan interaksi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya dengan tujuan mengembangkan pencapaian dan mengidentifikasi peluang untuk kerjasama lebih lanjut

e) Setiap penyelenggaraan Forum Tinjauan Migrasi Internasional akan menghasilkan Deklarasi Kemajuan yang mendapat persetujuan antar-pemerintah, untuk menjadi pertimbangan bagi Forum Politik Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan

50. Mengingat bahwa sebagian besar migrasi internasional terjadi (antar negara) di dalam satu regional, maka kami mengundang segenap proses, platform, dan organisasi di tingkat subregional, regional dan lintas-regional yang relevan, termasuk Komisi Ekonomi Regional PBB atau Proses Konsultatif Regional, untuk meninjau pelaksanaan Global Compact di masing-masing wilayah, mulai tahun 2020, bergantian dengan diskusi di tingkat global dengan selang waktu empat tahun, dengan tujuan untuk secara efektif menyampaikan hasil dari setiap penyelenggaraan Forum Tinjauan Migrasi Internasional, dengan partisipasi dari semua pemangku kepentingan yang relevan.

51. Kami mengundang Forum Global tentang Migrasi dan Pembangunan untuk meluangkan kesempatan bagi pertukaran informal tahunan menyangkut pelaksanaan Global Compact, dan melaporkan temuan, praktik terbaik dan pendekatan inovatif ke Forum Tinjauan Migrasi Internasional.

52. Menyadari sumbangan penting dari prakarsa yang dipimpin oleh Negara dalam migrasi internasional, maka kami mengundang, seperti Dialog Internasional IOM

tentang Migrasi, Proses Konsultatif Regional, dan forum lainnya untuk ikut menyumbang dalam Forum Tinjauan Migrasi Internasional dengan menyediakan data, bukti, praktik terbaik, pendekatan dan rekomendasi inovatif yang terkait dengan pelaksanaan Global Compact untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Reguler

53. Kami mendorong semua Negara Anggota untuk mengembangkan, sesegera mungkin, tanggapan nasional yang sebaik-baiknya untuk pelaksanaan Global Compact, dan secara berkala dan inklusif melakukan peninjauan terhadap kemajuan di tingkat nasional, misalnya dengan mengurai dan meninjau pelaksanaan rencana nasional. Tinjauan tersebut semestinya menyerap sumbangan dari semua pemangku kepentingan yang relevan, serta dewan perwakilan rakyat dan pemerintah daerah, dan dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan informasi kepada Negara Anggota dalam Forum Tinjauan Migrasi Internasional dan forum lain yang relevan

54. Kami meminta Ketua Majelis Umum untuk meluncurkan dan menyimpulkan, pada tahun 2019, konsultasi antar pemerintah yang terbuka, transparan dan inklusif untuk mendapatkan gambaran setepatnya tentang modalitas dan aspek-aspek organisasi dari Forum Tinjauan Migrasi Internasional, dan menyajikan sumbangan dari tinjauan tingkat regional dan proses lainnya yang relevan terhadap Forum, sebagai sarana untuk lebih memperkuat efektivitas dan konsistensi dari rumusan tindak lanjut dan kaji ulang yang tercantum dalam Global Compact.